



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**GAMBARAN
PENGELOLA DATA
PENDIDIKAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN
BOP KESETARAAN**

2019

GAMBARAN PENGELOLA DATA PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BOP KESETARAAN TAHUN 2019

Diterbitkan Oleh:

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemendikbud, Gedung C Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Pengarah:

Dr. Ir. Bastari, M.A.

Penanggungjawab:

Dr. Budi Purwaka, M.M.

Editor:

Dra. Asimiyati, M.M.
Drs. Ade Nasrun, M.Si.

Penulis:

Khomaria Nurul Ainy, S.Si.

Desainer Sampul:

Khomaria Nurul Ainy, S.Si.

Pengumpul Data:

Tim Bidang PAUD Dikmas PDSPK

Cetakan Pertama, Desember 2019

ISBN: 978-602-8449-28-1

© 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

All rights reserved.

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Gambaran pengelola data Pendidikan Masyarakat dalam pengelolaan BOP Kesetaraan merupakan salah satu publikasi hasil pendayagunaan yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelola data Pendidikan Masyarakat yang baik akan berdampak pada pengelolaan BOP yang ada di lembaga.

Gambaran pengelola data Pendidikan Masyarakat dalam pengelolaan BOP Kesetaraan memberikan informasi terkait perkembangan peserta didik Kesetaraan sampai dengan tahun 2018. Selain itu juga disajikan data hasil survei pada responden operator tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan terkait pertanyaan tentang BOP, yang meliputi pengetahuan tentang BOP, penerimaan program, sosialisasi, juknis, pengetahuan tentang batas waktu melengkapi data.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang ketercapaian program BOP Pendidikan Kesetaraan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang Pendidikan Kesetaraan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2019
Kepala Pusat Data dan Statistik
Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. Ir. Bastari, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup	4
BAB II BOP KESETARAAN	6
2.1. Pendidikan Kesetaraan.....	6
2.2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).....	6
2.3. Distribusi Frekuensi.....	6
2.4. Tabulasi Silang (<i>Crosstab</i>)	7
2.5. <i>Text Mining</i>	7
2.5.1. <i>Text preprocessing</i>	8
2.5.2. <i>Feature Selection</i>	8
2.5.3. <i>Text Representation</i>	8
2.4.5. <i>Application of The Text Mining Techniques</i>	9
BAB III METODOLOGI	10

3.1. Persiapan	10
3.2. Penyusunan Instrumen.....	10
3.3. Pelaksanaan.....	12
3.3.1. Koordinasi	12
3.3.2. Bimbingan Teknis	13
3.3.3. Pengumpulan	13
3.4. Penyusunan Laporan	14
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	15
4.1. Perkembangan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	15
4.2. Identitas Responden Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.....	16
4.2.1. Identitas Responden Tingkat Provinsi	16
4.2.2. Identitas Responden Tingkat Kabupaten/Kota.....	21
4.3. Pemahaman Responden Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).....	28
4.3.1. Pemahaman Responden Tingkat Provinsi Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)	28
4.3.2. Pemahaman Responden Tingkat Kabupaten/Kota Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)	36
4.4. Saran dan Masukan dari Responden Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).....	44

4.4.1. Saran dan Masukan dari Responden Tingkat Provinsi Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)	45
4.4.2. Saran dan Masukan dari Responden Tingkat Kabupaten/Kota Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
5.1. Simpulan.....	50
5.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Provinsi Dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi, dan Integrasi Data Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)	4
Tabel 1.2. Daftar Kabupaten/Kota Dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi, dan Integrasi Data Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)	5
Tabel 3.1. Instrumen Analisis Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)	11
Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	15
Tabel 4.2. Interpretasi Perkembangan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	16
Tabel 4.3. Daftar Kabupaten/Kota Tempat Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi, dan Integrasi Data PAUD dan Dikmas	22
Tabel 4.4. Saran dan Masukan Terkait BOP Kesetaraan dari Responden Tingkat Provinsi	47
Tabel 4.5. Saran dan Masukan Terkait BOP Kesetaraan dari Responden Tingkat Kabupaten/Kota	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Perkembangan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Menurut Program Layanan Pendidikan	16
Gambar 4.2. Diagram Lingkaran Jenis Kelamin Responden Tingkat Provinsi ...	17
Gambar 4.3. Histogram Usia Responden Tingkat Provinsi	18
Gambar 4.4. Diagram Lingkaran Jenis Jabatan Responden Tingkat Provinsi di Instansinya	19
Gambar 4.5. Diagram Lingkaran Status Kepegawaian Responden Tingkat Provinsi	19
Gambar 4.6. Diagram Lingkaran Kualifikasi Pendidikan Terakhir Responden Tingkat Provinsi	20
Gambar 4.7. Diagram Lingkaran Lama Bertugas Responden Tingkat Provinsi .	21
Gambar 4.8. Diagram Lingkaran Jenis Kelamin Responden Tingkat Kabupaten/Kota	23
Gambar 4.9. Histogram Usia Responden Tingkat Kabupaten/Kota	24
Gambar 4.10. Diagram Jenis Lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Responden Tingkat Kabupaten/Kota	25
Gambar 4.11. Diagram Lingkaran Jenis Jabatan Responden Tingkat Kabupaten/ Kota di Instansinya	25
Gambar 4.12. Diagram Lingkaran Status Kepegawaian Responden Tingkat Kabupaten/Kota	26
Gambar 4.13. Diagram Lingkaran Kualifikasi Pendidikan Terakhir Responden Tingkat Kabupaten/Kota	27
Gambar 4.14. Diagram Lingkaran Lama Bertugas Responden Tingkat Kabupaten/Kota	28
Gambar 4.15. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah Anda mengetahui tentang BOP?”	29
Gambar 4.16. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah lembaga pendidikan Anda/di wilayah Anda pernah menerima BOP?”	30

Gambar 4.17.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah pengelola BOP sudah mengikuti sosialisasi/pelatihan terkait BOP?”	31
Gambar 4.18.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah Anda memiliki juknis BOP?”	31
Gambar 4.19.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah masih mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan BOP?”	32
Gambar 4.20.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Berapa kali dana program BOP diterima lembaga?”	33
Gambar 4.21.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah lembaga memperbaiki/melengkapi data secara berkala?”	34
Gambar 4.22.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah Anda mengetahui batas waktu melengkapi data untuk pengajuan BOP?”	34
Gambar 4.23.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Adakah syarat minimal jumlah peserta didik di setiap rombongan belajar untuk mendapat BOP?”	35
Gambar 4.24.	Diagram Batang Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Berapa jumlah peserta didik minimal dalam satu rombongan belajar?”	36
Gambar 4.25.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah Anda mengetahui tentang BOP?”	37
Gambar 4.26.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah lembaga pendidikan Anda/di wilayah Anda pernah menerima BOP?”	38
Gambar 4.27.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah pengelola BOP sudah mengikuti sosialisasi/pelatihan terkait BOP?”	39
Gambar 4.28.	Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah Anda memiliki juknis BOP?”	39

Gambar 4.29. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah masih mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan BOP?”	40
Gambar 4.30. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Berapa kali dana program BOP diterima lembaga?”	41
Gambar 4.31. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah lembaga memperbaiki/melengkapi data secara berkala?”	42
Gambar 4.32. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah Anda mengetahui batas waktu melengkapi data untuk pengajuan BOP?”	42
Gambar 4.33. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Adakah syarat minimal jumlah peserta didik di setiap rombongan belajar untuk mendapat BOP?”	43
Gambar 4.34. Diagram Batang Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Berapa jumlah peserta didik minimal dalam satu rombongan belajar?”	44
Gambar 4.35. Wordcloud Data Saran Yang Disampaikan Oleh Responden Tingkat Provinsi terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)	45
Gambar 4.36. Grafik Kata Yang Paling Sering Muncul Dalam Data Saran dari Responden Tingkat Provinsi Terkait BOP kesetaraan	46
Gambar 4.37. <i>Wordcloud</i> Data Saran Yang Disampaikan Oleh Responden Tingkat Kabupaten/Kota terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)	47
Gambar 4.38. Grafik Kata Yang Paling Sering Muncul Dalam Data Saran dari Responden Tingkat Kabupaten/Kota Terkait BOP kesetaraan	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan hal yang sangat penting untuk manusia karena dapat menciptakan manusia yang berkualitas, berintelektual dan jauh dari kebodohan. Untuk dapat mewujudkan agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang cukup dan layak, negara telah mengatur Hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mendapat pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidupnya yaitu pada UUD pasal 28 C ayat 1 dan 2 dan pasal 31. Dalam melaksanakan amanah UUD 1945 ini, pemerintah dalam hal ini membuat program wajib belajar sembilan tahun. Wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau sekarang disebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini dilatar belakangi dari munculnya program wajib belajar enam tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994 ditingkatkan menjadi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) selama 6 tahun hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) selama 3 tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pada BAB III Penyelenggaraan pasal 3 ayat 1 sampai 3 disebutkan bahwa wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat. Program Paket A dan Paket B merupakan jenis pendidikan non formal yang termasuk dalam pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non formal  ditunjukkan bagi peserta didik yang berasal

dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya. Juga untuk warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan kesetaraan program paket A dan paket B adalah program pendidikan non formal yang setara dengan pendidikan setingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Sehingga, pendidikan kesetaraan paket A dan paket B ikut serta dalam menyelesaikan penuntasan pendidikan dasar 9 tahun.

Sasaran peserta didik pendidikan kesetaraan pada umumnya adalah masyarakat marginal yang karena faktor sosial ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jalur formal atau sekolah. Di samping itu juga mungkin karena faktor geografis, yang bertempat tinggal atau bermukim di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, atau wilayah lainnya yang sulit dijangkau dan tidak memperoleh akses layanan pendidikan formal. Disamping itu, sangat mungkin mereka karena sesuatu hal terpaksa harus putus sekolah atau putus lanjut dari bangku sekolah. Dalam rangka memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh layanan pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/SMK/MA. Untuk menyelesaikan layanan program ini, pemerintah menyediakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) yang akan digunakan oleh para pimpinan lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan di daerah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan, dan menyelenggarakan fungsi salah satunya yaitu pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan, PDSPK akan melakukan analisis gambaran pengelola data pendidikan masyarakat dalam

pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP).

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program paket A, Paket B, dan Paket C.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

1.3. Tujuan

- a. Mengetahui perkembangan jumlah peserta didik Pendidikan Kesetaraan selama 5 tahun terakhir.
- b. Mengetahui Identitas Responden Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Operator Satuan pendidikan.
- c. Mengetahui pemahaman Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Operator Satuan pendidikan terkait pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP).
- d. Mengetahui saran dan masukan dari Operator Dinas Kabupaten/Kota dan Operator Satuan pendidikan terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP).

1.4. Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam analisis ini adalah terkait wilayah/daerah. Wilayah/daerah yang akan dibahas dalam analisis ini adalah daerah yang dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi, dan Integrasi Data Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Tahun 2019. Berikut ini adalah daftar provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis.

Tabel 1.1. Daftar Provinsi Dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi, dan Integrasi Data Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

No.	Provinsi	No.	Provinsi
1	Provinsi Aceh	9	Provinsi Kalimantan Tengah
2	Provinsi Banten	10	Provinsi Lampung
3	Provinsi Bengkulu	11	Provinsi Riau
4	Provinsi D.I. Yogyakarta	12	Provinsi Sulawesi Selatan
5	Provinsi Jambi	13	Provinsi Sulawesi Utara
6	Provinsi Jawa Tengah	14	Provinsi Sumatera Barat
7	Provinsi Jawa Timur	15	Provinsi Sumatera Selatan
8	Provinsi Kalimantan Selatan	16	Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1.2. Daftar Kabupaten/Kota Dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi, dan Integrasi Data Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Malang	1	Kabupaten Tapin
2	Kabupaten Bintan	2	Kabupaten Gresik
3	Kabupaten Kuburaya	3	Kota Blitar
4	Kota Jambi	4	Kabupaten Tegal
5	Kota Tomohon	5	Kabupaten Konawe Selatan
6	Kabupaten Gorontalo	6	Kabupaten Ende
7	Kabupaten Pandeglang	7	Kota Batu
8	Kabupaten Badung	8	Kabupaten Manggarai Barat
9	Kota Kendari	9	Kabupaten Jember
10	Kota Bengkulu	10	Kota Ternate
11	Kota Banjarbaru	11	Kota Kediri
12	Kota Dumai	12	Kabupaten Bangka Barat
13	Kota Denpasar	13	Kabupaten Subang
14	Kota Palangkaraya	14	Kabupaten Belitung
15	Kabupaten Mempawah	15	Kota Pariaman
16	Kabupaten Banyuasin	16	Kabupaten Kepahiang
17	Kota Balikpapan	17	Kota Madiun

BAB II

BOP KESETARAAN

2.1. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Kesetaraan adalah upaya pembinaan yang ditujukan prioritas kepada anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu hal tidak bisa masuk ke pendidikan formal Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, sehingga anak tersebut mempunyai bekal pengetahuan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan atau untuk bisa membangun masa depannya dengan baik (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019).

2.2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia bagi peserta didik pendidikan kesetaraan yang diberikan melalui satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019).

2.3. Distribusi Frekuensi

Data yang terkumpul dalam jumlah yang besar perlu ditata atau diorganisir dengan cara meringkas data tersebut ke dalam bentuk kelompok data. Tujuannya supaya dapat segera diketahui ciri-cirinya dan dengan mudah dianalisis sesuai dengan keinginan. Pengelompokan data tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyaknya nilai yang termasuk dalam setiap kelas yang disebut frekuensi kelas. Suatu pengelompokan atau penyusunan data menjadi tabulasi data yang memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Susunan atau ringkasan data

dalam bentuk distribusi frekuensi seperti dalam tabel sering disebut data berkelompok. Ada dua jenis distribusi frekuensi, yaitu:

- a. Distribusi frekuensi kuantitatif: penyusunan data menurut besarnya (kuantitasnya). Kuantitatif ditandai dengan penggunaan kategori yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram.
- b. Distribusi frekuensi kualitatif (kategori): penyusunan data menurut kualitasnya. Skala pengukuran yang dipergunakan untuk data kualitatif adalah skala nominal dan ordinal.

Pada sebuah penelitian, deskripsi data sangat penting untuk memberikan gambaran data yang diteliti. Selain itu, dengan adanya deskripsi data akan memudahkan orang mengetahui paparan data dalam sebuah penelitian secara lebih terperinci dan jelas.

Fungsi dari statistik deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang disajikan dengan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemiringan distribusi).

Statistik distribusi frekuensi termasuk dalam kategori statistik deskriptif. Distribusi frekuensi digunakan untuk memberikan gambaran sekilas dan ringkas dari sekelompok data dalam suatu tabel frekuensi. (Wahana Komputer, 2017)

2.4. Tabulasi Silang (*Crosstab*)

Statistik deskriptif crosstab (tabulasi silang) termasuk dalam analisis deskripsi. Namun, ada perbedaan dibandingkan dengan statistik deskriptif frekuensi dan eksploratif. Deskriptif tabulasi silang (crosstab) menyajikan data dalam bentuk tabulasi, yang meliputi baris dan kolom. Ciri-ciri crosstab pada umumnya adalah dua variabel atau lebih yang mempunyai kualitatif, khususnya berskala nominal seperti hubungan antara jenis kelamin dengan usia, jenis kelamin dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. (Wahana Komputer, 2017)

2.5. *Text Mining*

Pengolahan dan pengambilan informasi dari sebuah data tekstual merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan

teknik Data Mining. Diperlukan beberapa tahapan proses tambahan agar data tekstual yang memiliki format tidak teratur dapat dilakukan pengolahan dan pengambilan informasi, tahapan proses tersebut dikenal dengan istilah Text Mining. Penjelasan tahapan proses Text Mining yang terdapat dalam Jurnal Sains dan Seni ITS (Santosa dan Indraloka, 2017) adalah sebagai berikut ini.

2.5.1. Text preprocessing

Merupakan tahapan awal dari Text Mining, tahap ini meliputi proses untuk mempersiapkan data tekstual yang akan digunakan agar dapat diproses pada tahapan berikutnya. Proses yang dilakukan pada tahapan ini antara lain:

1. Case folding yaitu merubah semua karakter huruf pada sebuah kalimat menjadi huruf kecil dan menghilangkan karakter yang dianggap tidak valid seperti angka, tanda baca, dan Uniform Resources Locator (URL)
2. Tokenizing yaitu memotong sebuah kalimat berdasarkan tiap kata yang menyusunnya.
3. Stemming yaitu merubah berbagai kata berimbuhan menjadi kata dasarnya, tahap ini pada umumnya dilakukan untuk teks dengan bahasa Inggris, karena teks dengan Inggris memiliki struktur imbuhan yang tetap.
4. Tagging yaitu merubah berbagai kata dalam bentuk lampau menjadi kata awalnya, tahap ini pada umumnya dilakukan untuk teks dengan bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang memiliki bentuk lampau.

2.5.2. Feature Selection

Merupakan tahapan untuk mengurangi dimensi dari sebuah data tekstual sehingga hasil dari proses Text mining memiliki kualitas yang lebih baik. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah stopward removal yaitu menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak penting atau tidak menggambarkan isi dari sebuah kalimat.

2.5.3. Text Representation

Merupakan tahapan merubah data tekstual menjadi representasi yang lebih mudah untuk diproses. Pada tahapan ini, sebuah kalimat direpresentasikan sebagai objek dan kata-kata yang menyusunnya direpresentasikan sebagai fitur. Data tekstual akan membentuk sebuah ruang

dengan jumlah objek sebanyak jumlah kalimat yang ada dan jumlah fitur sebanyak jumlah kata yang berbeda.

2.4.5. *Application of The Text Mining Techniques*

Merupakan tahapan utama pada proses Text Mining. Pada tahapan ini dilakukan penerapan teknik yang digunakan untuk pengambilan informasi dari data tekstual yang telah diproses sebelumnya. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan diantaranya classification, clustering, information extraction, trend analysis, distribution analysis, dan association rules. Pemilihan teknik yang digunakan disesuaikan dengan jenis informasi yang ingin diambil dari data tekstual yang tersedia.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Persiapan

Pada tahap persiapan ini dilakukan desk study terhadap referensi yang berkaitan dengan pendidikan dan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP kesetaraan). Selain itu juga dilakukan pencarian referensi terkait metode analisis yang akan digunakan. Dalam analisis kali ini digunakan metode analisis Tabulasi Silang (Crosstab) dan juga Text Mining untuk menganalisis data tekstual dalam jawaban pertanyaan terbuka, yang tertuang dalam saran terkait BOP Kesetaraan dari Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Operator Satuan pendidikan.

3.2. Penyusunan Instrumen

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Penyusunan Instrumen dalam melakukan analisis Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) ini digunakan sebagai alat atau fasilitas dalam mengumpulkan data agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam analisis kali ini, digunakan jenis variasi instrumen penelitian yaitu angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden (Wikipedia, 2019).

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada analisis ini adalah pertanyaan-pertanyaan dengan tersedia pilihan jawaban. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Operator Satuan pendidikan) tentang diri pribadi atau hal-hal yang diketahui. Tujuan penyebaran angket ini ialah mencari informasi dari Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Operator Satuan pendidikan terkait pemahamannya tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan). Berikut ini adalah

daftar pertanyaan terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) yang terdapat dalam angket tersebut.

Tabel 3.1. Instrumen Analisis Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
1.	Tanggal Pengisian (DD/MM/YYYY)	
	Identitas Instansi	
2	Nama Provinsi	
3	Nama Kota/Kabupaten (Tuliskan nama Kota/Kabupaten	a. Kota b. Kabupaten
4	Jenis Instansi	a. Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas b. Dinas Pendidikan Provinsi c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota d. Satuan Pendidikan atau Lembaga e. Lainnya,
5	Jenjang jika berbentuk satuan pendidikan	
	Identitas Pengelola Data	
6	Jenis Kelamin	a. Perempuan b. Laki-Laki
7	Usia (Isikan hanya angka dalam satuan tahun)	
8	Jabatan di Instansi	a. Pejabat struktural b. Staf teknis c. Kepala/Wakil lembaga d. Pengajar (Guru) e. Staf Administrasi f. Lainnya,
9	Status Kepegawaian	a. Tetap b. Tidak tetap
10	Kualifikasi Pendidikan Terakhir	a. Setara SMA/SMK/MA b. Diploma c. Sarjana d. Pascasarjana e. Lainnya,
11	Lama bertugas sebagai pengelola data (Operator)	a. Kurang dari 3 bulan b. Antara 3 – 12 bulan c. Lebih dari 12 bulan
	Pemahaman Terkait Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)	
12	Apakah Anda mengetahui tentang	a. Ya

	BOP?	b. Tidak
13	Apakah lembaga pendidikan Anda/di wilayah Anda pernah menerima BOP?	a. Selalu b. Pernah c. Tidak pernah
14	Apakah pengelola BOP sudah mengikuti sosialisasi/pelatihan terkait BOP?	a. Sudah b. Belum c. Tidak tahu
15	Apakah Anda memiliki Juknis BOP?	a. Ya b. Belum, karena
16	Jika sudah memiliki Juknis BOP, apakah masih mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan BOP?	a. Tidak b. Ya, karena
17	Berapa kali dana program BOP diterima lembaga?	a. 1 kali dalam 1 semester b. 1 kali dalam 1 tahun c. Lainnya, sebutkan
18	Apakah lembaga memperbaiki/melengkapi data secara berkala?	a. 1 kali dalam 1 semester b. 1 kali dalam 1 tahun c. Setiap ada perubahan d. Tidak, karena
19	Apakah Anda mengetahui batas waktu melengkapi data untuk pengajuan BOP?	a. Ya b. Kadang-Kadang c. Tidak
20	Adakah syarat minimal jumlah peserta didik di setiap rombongan belajar untuk mendapat BOP?	a. Ya b. Tidak
21	Jika iya, sebutkan berapa jumlah peserta didik minimal dalam satu rombongan belajar	
22	Apa saran Anda terkait BOP	

3.3. Pelaksanaan

3.3.1. Koordinasi

Dalam pelaksanaan kegiatan survey instrumen analisis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP), hal yang pertama dilakukan koordinasi. Koordinasi ini dilakukan dengan Pusat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP/PP PAUD dan Dikmas) untuk tingkatan provinsi, dan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk tingkatan Kabupaten/Kota. Tahap awal yang dilakukan dalam koordinasi adalah dengan mencari nomor kontak Operator PAUD dan Dikmas dari PP/BP-PAUD dan Dikmas atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di laman sdm.data.kemdikbud.go.id. Setelah mendapatkan kontak nomor telpon

dari Operator PP/BP-PAUD dan Dikmas atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maka selanjutnya menyampaikan surat pengantar dan semua hal terkait kegiatan Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan, khususnya terkait apa saja yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya selalu memantau dan memastikan bahwa persiapan untuk kegiatan bimbingan teknis ini berjalan dengan baik, dengan harapan bahwa kegiatan ini sudah bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala.

3.3.2. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis verifikasi, validasi, dan integrasi data dilaksanakan dalam rangka optimalisasi, sosialisasi kebijakan teknis, dan sinkronisasi pengelolaan data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam tingkatan provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tingkat provinsi, yang menjadi peserta adalah operator data PAUD dan Dikmas pada PP/BP-PAUD dan Dikmas dan juga seluruh operator data PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut. Sedangkan bimbingan teknis tingkat kabupaten/kota dengan mengundang perwakilan operator satuan pendidikan PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS) dan operator satuan pendidikan Dikmas (SKB, PKBM, dan LKP). Materi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan teknis ini adalah terkait kebijakan pengelolaan data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Aplikasi jaringan pengelola data pendidikan (sdm.data.kemdikbud.go.id), Aplikasi verifikasi dan validasi data peserta didik (vervalpd.data.kemdikbud.go.id), aplikasi verifikasi dan validasi satuan pendidikan (vervalsp.data.kemdikbud.go.id), dan aplikasi verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan (vervalptk.data.kemdikbud.go.id).

3.3.3. Pengumpulan

Setelah peserta diberikan bimbingan teknis terkait materi pengelolaan data PAUD dan Dikmas, selanjutnya peserta disuruh mengisi instrumen terkait pengelolaan data PAUD dan Dikmas dan terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan). Pengisian instrumen ini merupakan upaya pengumpulan data untuk mengetahui pengetahuan operator dinas pendidikan kabupaten/kota dan operator satuan pendidikan terkait pengelolaan data BOP Kesetaraan.

3.4. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilakukan dengan melakukan studi analisis yang akan digunakan untuk pengolahan data hasil survey. Dalam penyusunan laporan ini akan diperoleh hasil terkait pemahaman operator dinas pendidikan kabupaten/kota dan operator satuan pendidikan pendidikan masyarakat (PKBM, SKB, dan LKP) tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP kesetaraan). Dari hasil ini didapatkan informasi yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan oleh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan BOP Kesetaraan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

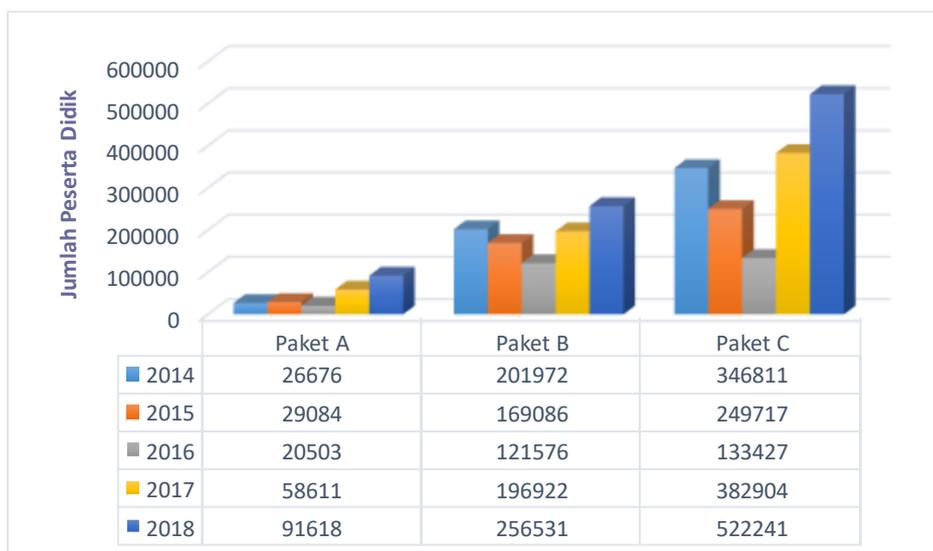
4.1. Perkembangan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

Dalam Pendidikan Kesetaraan terdapat tiga macam layanan program pendidikan, yaitu program Paket A, program Paket B, dan program Paket C. Program layanan Paket A setara dengan pendidikan formal Sekolah Dasar (SD), program layanan Paket B setara dengan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan program layanan Paket C setara dengan pendidikan formal Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

No.	Provinsi	Jumlah Peserta Didik Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	D.K.I. Jakarta	12.501	9.563	3.365	27.900	30.013
2	Jawa Barat	41.985	33.855	85.168	138.706	165.961
3	Jawa Tengah	69.008	53.108	21.873	69.522	89.420
4	D.I. Yogyakarta	5.687	4.505	2.104	6.232	8.408
5	Jawa Timur	103.777	82.824	33.659	73.625	104.114
6	Aceh	24.432	18.994	5.742	9.261	16.734
7	Sumatera Utara	9.086	6.938	15.363	22.344	31.626
8	Sumatera Barat	4.442	3.414	4.958	14.808	19.722
9	Riau	15.004	11.501	4.987	11.518	14.606
10	Jambi	4.959	3.849	3.344	8.172	13.777
11	Sumatera Selatan	17.737	14.160	7.534	16.136	28.180
12	Lampung	12.971	11.881	8.441	18.894	26.967
13	Kalimantan Barat	10.263	8.301	6.351	9.402	14.550
14	Kalimantan Tengah	10.268	8.269	3.675	9.987	10.938
15	Kalimantan Selatan	14.208	11.463	3.923	21.285	26.617
16	Kalimantan Timur	5.402	4.311	3.051	8.146	11.494
17	Sulawesi Utara	5.086	3.909	2.604	6.050	10.224
18	Sulawesi Tengah	6.910	6.182	3.049	6.420	9.527
19	Sulawesi Selatan	12.647	10.429	11.817	22.143	43.107
20	Sulawesi Tenggara	22.738	18.376	4.843	10.634	22.626
21	Maluku	10.426	8.201	2.284	1.985	6.755
22	Bali	9.034	6.961	2.525	6.236	6.985
23	Nusa Tenggara Barat	12.692	9.893	4.765	25.884	34.885
24	Nusa Tenggara Timur	6.927	5.409	7.236	7.614	14.806
25	Papua	21.611	16.448	987	13.623	15.389
26	Bengkulu	10.536	8.330	2.000	8.736	11.015
27	Maluku Utara	24.898	11.917	1.267	2.268	4.927
28	Banten	30.606	23.371	9.854	31.369	3.6183
29	Kepulauan Bangka Belitung	6.994	5.421	1.150	3.535	5.547
30	Gorontalo	4.670	3.858	1.536	3.337	6.544
31	Kepulauan Riau	11.155	8.814	1.808	5.676	6.700
32	Papua Barat	7.032	5.525	1.158	3.188	5.128
33	Sulawesi Barat	8.407	6.791	2.301	9.669	11.897
34	Kalimantan Utara	1.360	1.116	784	4.132	5.018
	Indonesia	575.459	447.887	275.506	638.437	870.390

Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id



Gambar 4.1. Perkembangan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Menurut Program Layanan Pendidikan

Tabel 4.1 menampilkan perkembangan jumlah peserta didik Pendidikan Kesetaraan secara keseluruhan, dari program layanan Paket A, Paket B, dan Paket C mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Gambar 4.1 menunjukkan jumlah peserta didik Pendidikan Kesetaraan selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2019, pada masing-masing program layanan pendidikan. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 di atas, diperoleh hasil seperti berikut ini.

Tabel 4.2. Interpretasi Perkembangan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

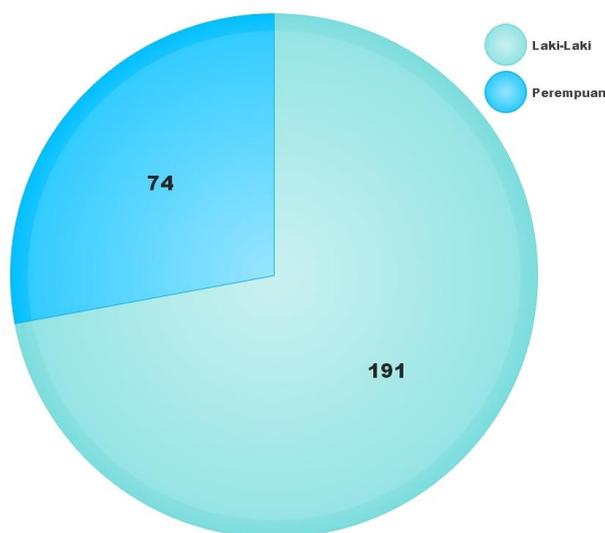
Interpretasi Data	Peserta Didik	2014 ke	2015 ke	2016 ke	2017 ke
		2015	2016	2017	2018
	Paket A	Naik	Turun	Naik	Naik
	Paket B	Turun	Turun	Naik	Naik
	Paket C	Turun	Turun	Naik	Naik
	Kesetaraan	Turun	Turun	Naik	Naik

4.2. Identitas Responden Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota

4.2.1. Identitas Responden Tingkat Provinsi

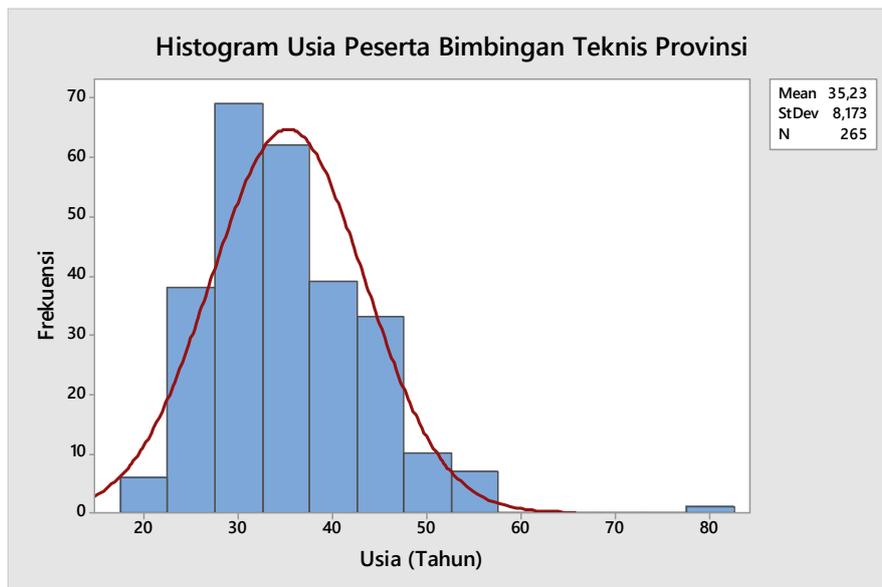


Bimbingan teknis tingkat provinsi pada tahun 2019 dilaksanakan di 16 provinsi, yaitu Aceh, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Yang menjadi peserta dalam bimbingan teknis ini adalah 1 operator data PAUD dan Dikmas di PP/BP-PAUD dan Dikmas dan seluruh operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ada di provinsi tersebut. Berikut ini akan dibahas tentang data identitas dari operator data PAUD dan Dikmas yang mengikuti bimbingan teknis pada tingkat provinsi.



Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Jenis Kelamin Responden Tingkat Provinsi

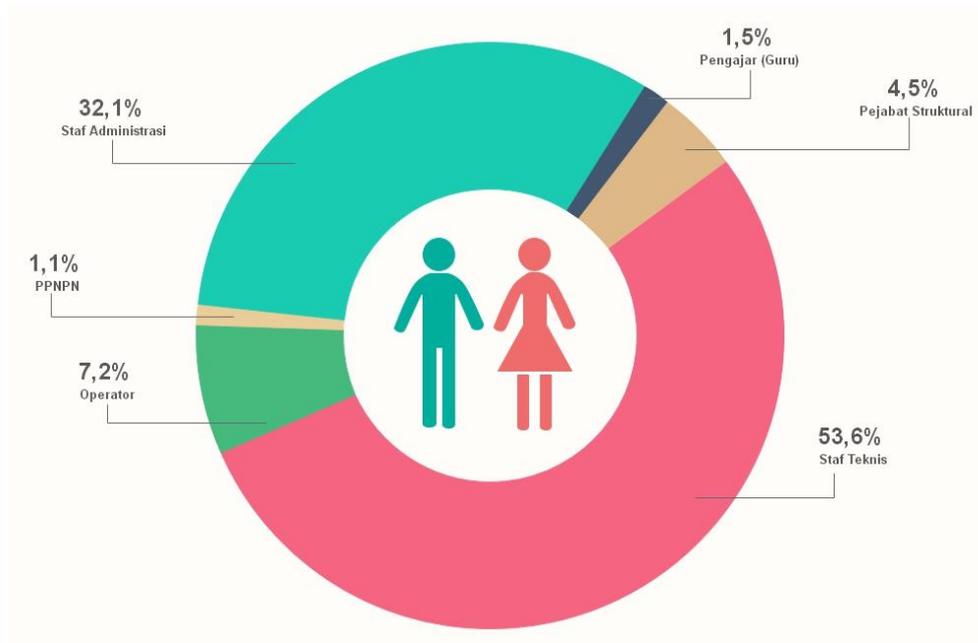
Gambar 4.2. di atas menunjukkan diagram lingkaran data jenis kelamin responden, yang merupakan operator data PAUD dan Dikmas dari PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dari hasil total seluruh provinsi yang dijadikan tempat bimbingan teknis, diketahui total 265 orang operator yang mengisi instrumen analisis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) , ada sebanyak 191 orang atau setara 72,1% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan operator perempuan yang mengisi instrumen analisis sebanyak 74 orang atau setara 27,9%.



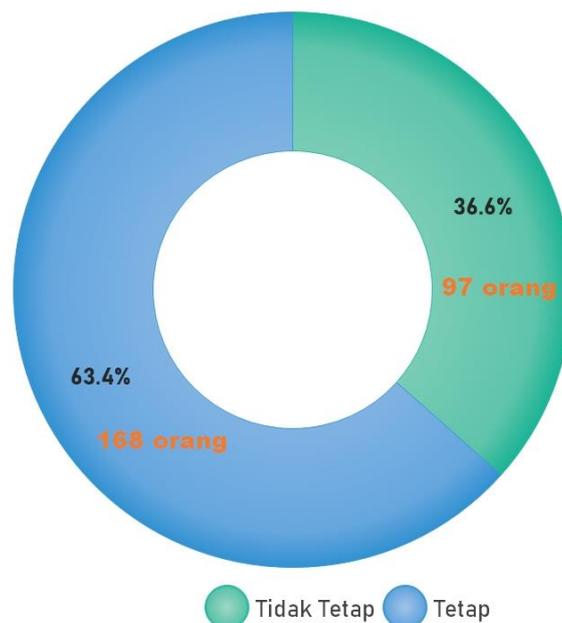
Gambar 4.3. Histogram Usia Responden Tingkat Provinsi

Berdasarkan Gambar 4.3 histogram dari data usia operator data PAUD dan Dikmas dari PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimbingan teknis tingkat provinsi, terlihat bahwa tampilan histogram usia peserta bimbingan teknis mendekati tampilan kurva normal, dengan frekuensi paling banyak ada di usia antara 30 – 40 tahun. Dari jumlah total peserta sebanyak 265 orang, diperoleh rata-rata (*mean*) usia peserta bimbingan teknis tingkat provinsi adalah 35,23 tahun. Usia peserta bimbingan teknis tingkat ini provinsi ini yang paling muda ada di bawah 20 tahun, dan usia yang paling tinggi ada di 82 tahun.

Pada gambar diagram lingkaran jenis jabatan operator data PAUD dan Dikmas dari PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimbingan teknis tingkat provinsi, diperoleh hasil bahwa jabatan yang paling banyak adalah sebagai staf teknis, sebesar 53,6% atau setara 142 orang. Selain staf teknis, ada staf administrasi sebanyak 85 orang (32,1%), operator sebanyak 19 orang (7,2%), pejabat struktural sebanyak 12 orang (4,5%), pengajar (guru) sebanyak 4 orang (1,5%), dan ada PNPB sebanyak 3 orang (1,1%).

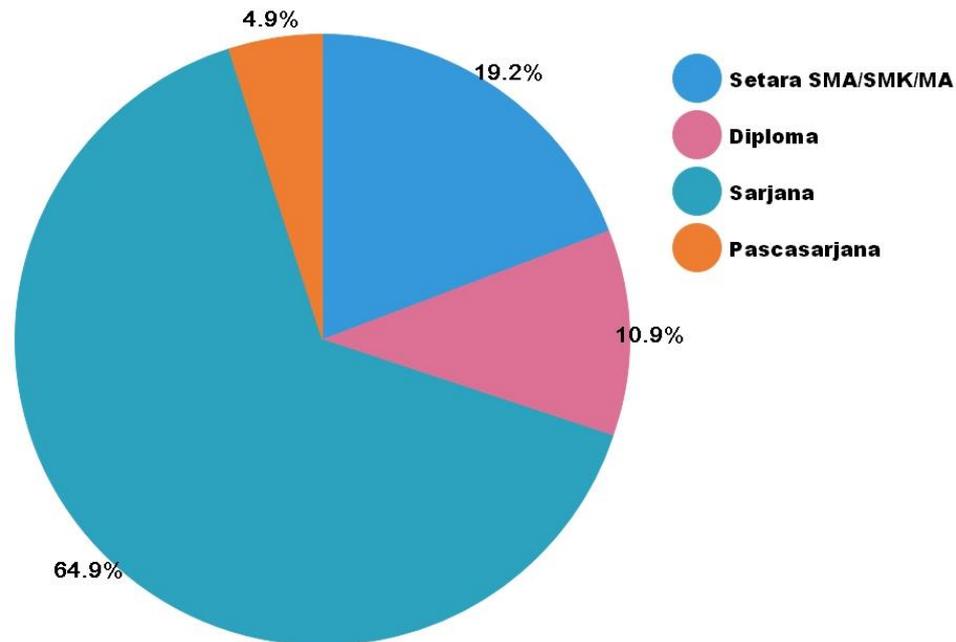


Gambar 4.4. Diagram Lingkaran Jenis Jabatan Responden Tingkat Provinsi di Instansinya



Gambar 4.5. Diagram Lingkaran Status Kepegawaian Responden Tingkat Provinsi

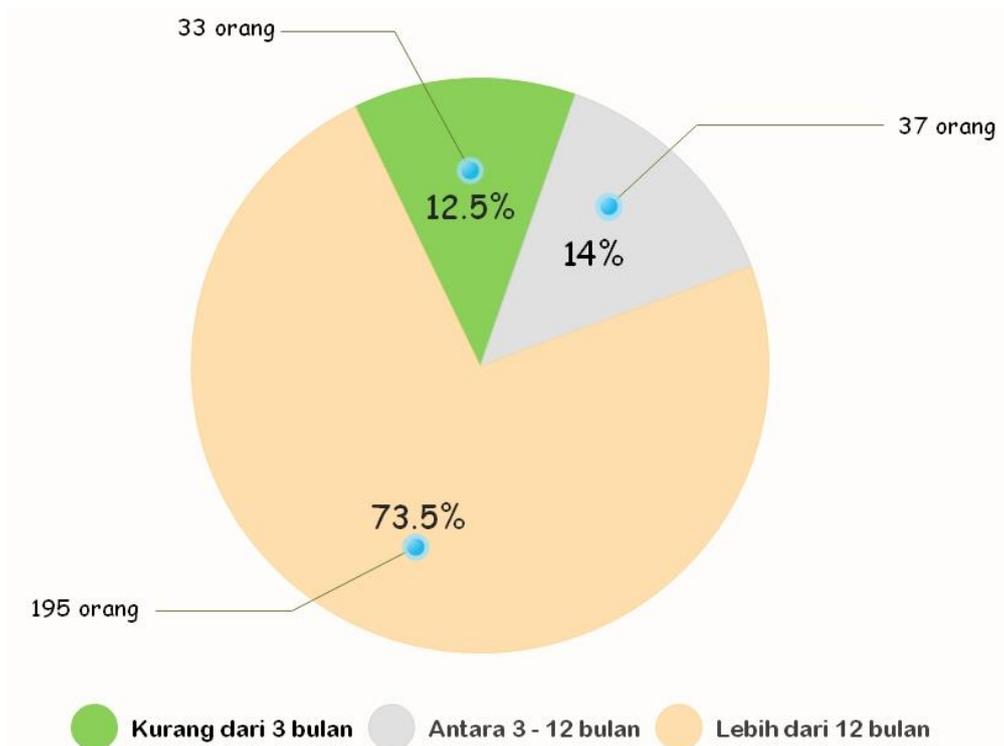
Gambar 4.5. yang ditunjukkan di atas menampilkan diagram lingkaran dari identitas operator data PAUD dan Dikmas dari PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimbingan teknis tingkat provinsi menurut status kepegawaian. Diketahui bahwa 63,4 % atau setara 168 orang operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis adalah pegawai tetap, dan 36,6% atau sebanyak 97 orang memiliki status pegawai tidak tetap.



Gambar 4.6. Diagram Lingkaran Kualifikasi Pendidikan Terakhir Responden Tingkat Provinsi

Hasil diagram lingkaran identitas operator data PAUD dan Dikmas dari PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimbingan teknis tingkat provinsi menurut kualifikasi pendidikan terakhir yang ditampilkan pada Gambar 4.6 di atas, menunjukkan bahwa responden yang mengisi instrument analisis paling banyak berpendidikan sarjana (S1), yaitu sebanyak 172 orang atau setara 64,9%. Untuk kualifikasi pendidikan terakhir yang lain yaitu setara SMA/SMK/MA sebesar 19,2 % (51 orang), kemudian Diploma sebesar 10,9 % (29 orang), dan yang paling sedikit adalah berpendidikan terakhir pascasarjana hanya 13 orang atau setara dengan 4,9%.

Berikut ini adalah Gambar 4.7. yang menunjukkan diagram lingkaran data operator PAUD dan Dikmas dari PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimbingan teknis tingkat provinsi menurut lama bertugas sebagai pengelola data (operator). Dari hasil yang ditampilkan diketahui bahwa operator dengan lama bertugas kurang dari 3 bulan jumlahnya paling sedikit, yaitu hanya 33 orang (12,5%), selanjutnya yang lama bertugas antara 3 - 12 bulan sebanyak 37 orang (14,0%), dan yang paling banyak adalah yang bertugas lebih dari 12 bulan sebanyak 195 orang (73,5%).



Gambar 4.7. Diagram Lingkaran Lama Bertugas Responden Tingkat Provinsi

4.2.2. Identitas Responden Tingkat Kabupaten/Kota

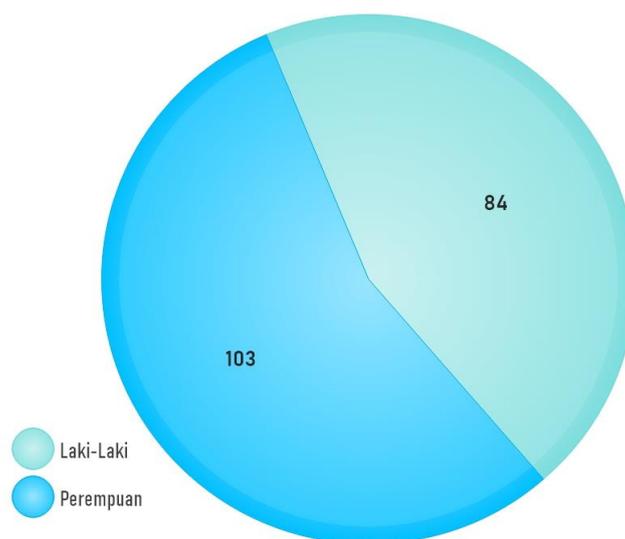
Bimbingan teknis tingkat kabupaten/kota pada tahun 2019 dilaksanakan di 33 daerah kabupaten/kota, dan itu tersebar di 21 provinsi. Berikut ini akan ditampilkan data kabupaten/kota yang menjadi tempat untuk kegiatan bimbingan teknis.

Tabel 4.3. Daftar Kabupaten/Kota Tempat Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi, dan Integrasi Data PAUD dan Dikmas

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Bali	- Kabupaten Badung - Kota Denpasar
2.	Banten	Kabupaten Pandeglang
3.	Bengkulu	- Kabupaten Bengkulu Utara

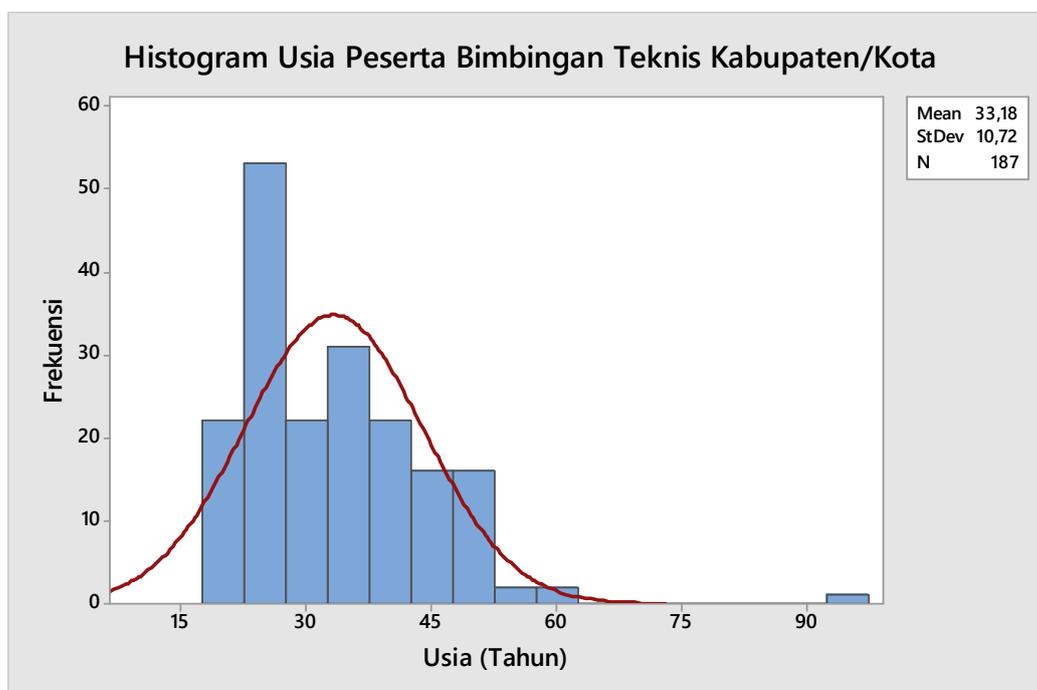
		- Kota Bengkulu
4.	Gorontalo	- Kabupaten Gorontalo
5.	Jambi	- Kota Jambi
6.	Jawa Barat	- Kabupaten Subang
7.	Jawa Tengah	- Kabupaten Tegal
8.	Jawa Timur	- Kabupaten Jember - Kabupaten Malang - Kota Batu - Kota Blitar - Kota Kediri - Kota Madiun
9.	Kalimantan Barat	- Kabupaten Kubu Raya - Kabupaten Mempawah
10.	Kalimantan Selatan	- Kota Banjarbaru - Kabupaten Tapin
11.	Kalimantan Tengah	- Kota Palangkaraya
12.	Kalimantan Timur	- Kota Balikpapan
13.	Kepulauan Bangka Belitung	- Kabupaten Bangka Barat - Kabupaten Belitung - Kota Tanjungpandan
14.	Kepulauan Riau	- Kabupaten Bintan
15.	Maluku Utara	- Kota Ternate
16.	Nusa Tenggara Timur	- Kabupaten Ende - Kabupaten Manggarai Barat
17.	Riau	- Kota Dumai
18.	Sulawesi Tenggara	- Kabupaten Konawe Selatan
19.	Sulawesi Utara	- Kota Tomohon
20.	Sumatera Barat	- Kota Pariaman
21.	Sumatera Selatan	- Kabupaten Banyuasin

Bimbingan teknis verifikasi, validasi, dan integrasi data tingkat kabupaten/kota dilaksanakan di dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Yang menjadi peserta bimbingan teknis ini dan sekaligus menjadi responden instrumen analisis BOP Kesetaraan adalah operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat, yaitu operator SKB, PKBM, dan LKP. Berikut ini akan dibahas tentang data identitas dari operator satuan pendidikan pendidikan masyarakat yang mengikuti bimbingan teknis pada tingkat kabupaten/kota.



Gambar 4.8. Diagram Lingkaran Jenis Kelamin Responden Tingkat Kabupaten/Kota

Dari hasil yang ditampilkan pada Gambar 4.8. di atas, diperoleh bahwa jumlah operator satuan pendidikan pada Pendidikan Masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis tingkat kabupaten/kota total ada sebanyak 187 orang. Jumlah operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat laki-laki lebih sedikit dari pada yang perempuan, yang laki-laki hanya 44,9% atau setara dengan 84 orang, sedangkan yang perempuan sebesar 55,1 % atau setara dengan 103 orang.

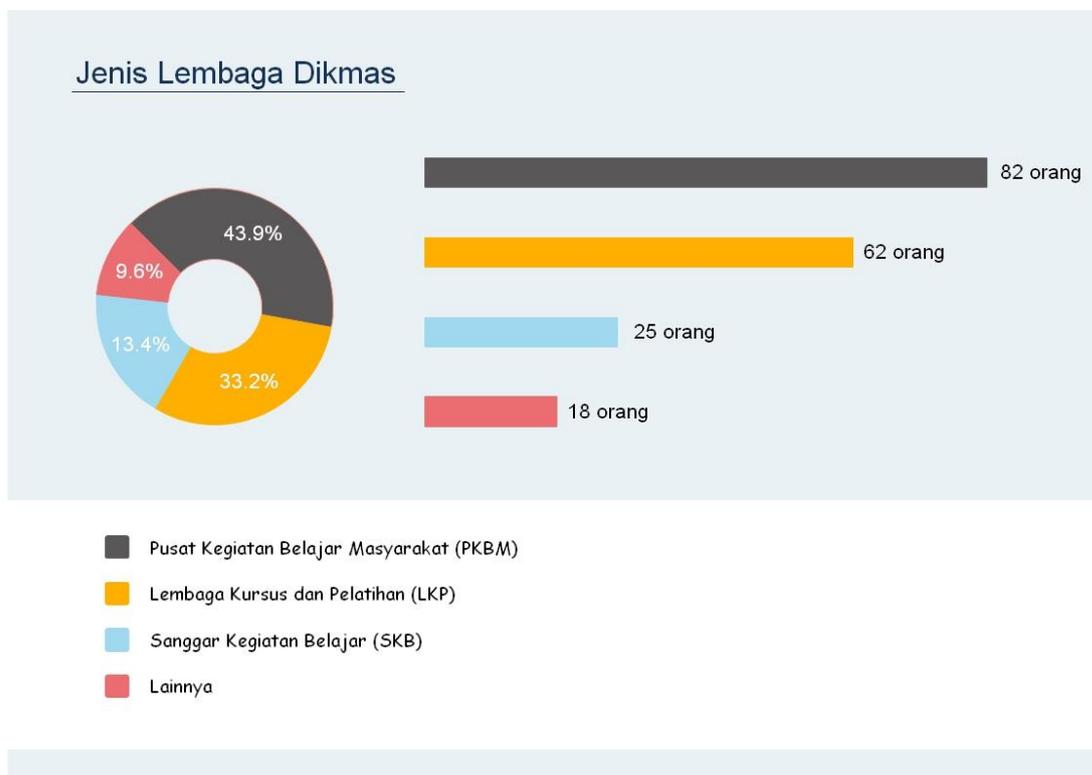


Gambar 4.9. Histogram Usia Responden Tingkat Kabupaten/Kota

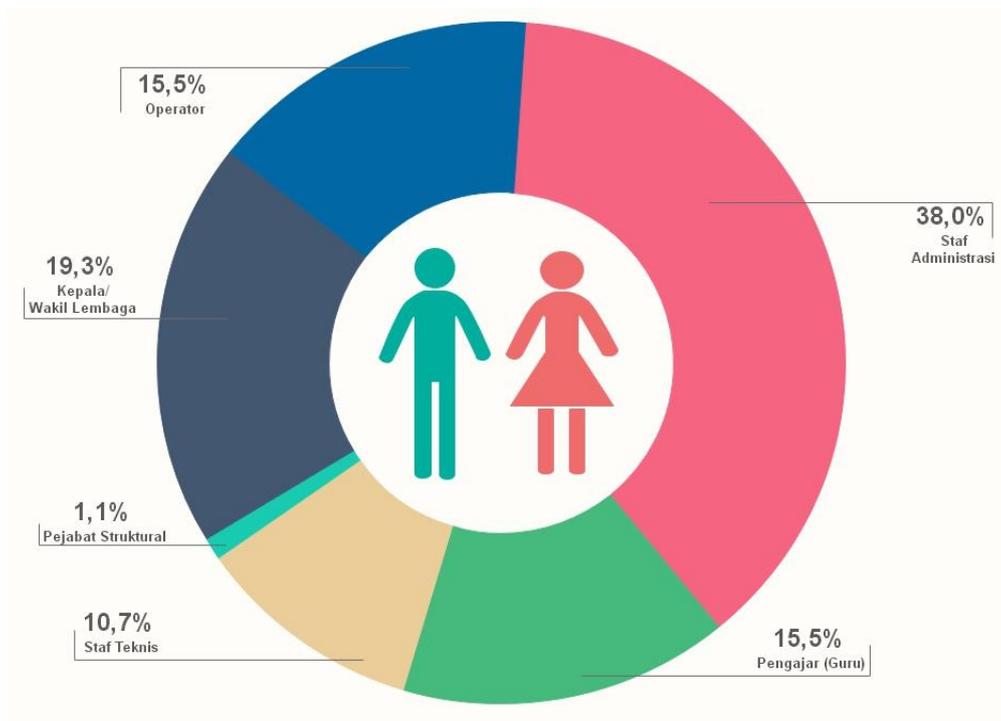
Berdasarkan Gambar 4.9 histogram dari data usia operator data satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat yang mengikuti bimbingan teknis tingkat

Kabupaten/Kota, terlihat bahwa tampilan histogram usia peserta bimbingan teknis yang paling tinggi frekuensinya adalah di kelompok usia 25 tahun. Dari jumlah total peserta sebanyak 187 orang, diperoleh rata-rata (*mean*) usia peserta bimbingan teknis tingkat Kabupaten/Kota adalah 33,18 tahun. Usia peserta bimbingan teknis tingkat ini Kabupaten/Kota ini yang paling muda adalah usia 18 tahun, sedangkan usia yang paling tinggi ada di 94 tahun.

Gambar 4.10 menunjukkan data operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) menurut jenis lembaga yang mengisi instrumen analisis BOP Kesetaraan. Dari hasil yang diperoleh, sebesar 43,9% atau 82 orang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 33,2% (62 orang) berasal dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), 13,4% (25 orang) berasal dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan sebesar 9,6% (18 orang) memilih berasal dari jenis lembaga lainnya, yang merupakan organisasi mitra.

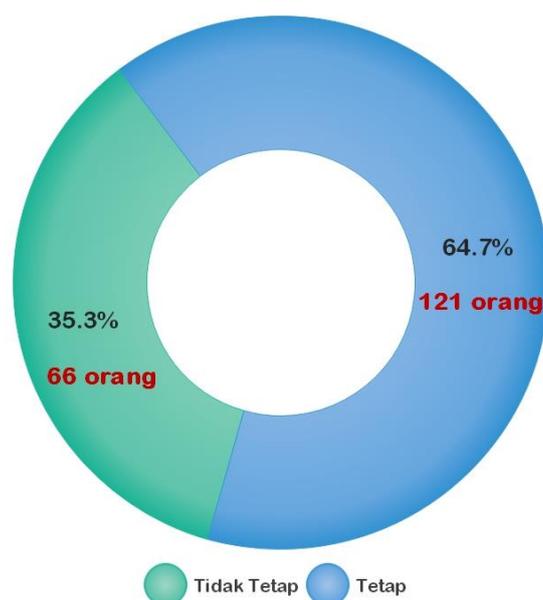


Gambar 4.10. Diagram Jenis Lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Responden Tingkat Kabupaten/Kota



Gambar 4.11. Diagram Lingkaran Jenis Jabatan Responden Tingkat Kabupaten/ Kota di Instansinya

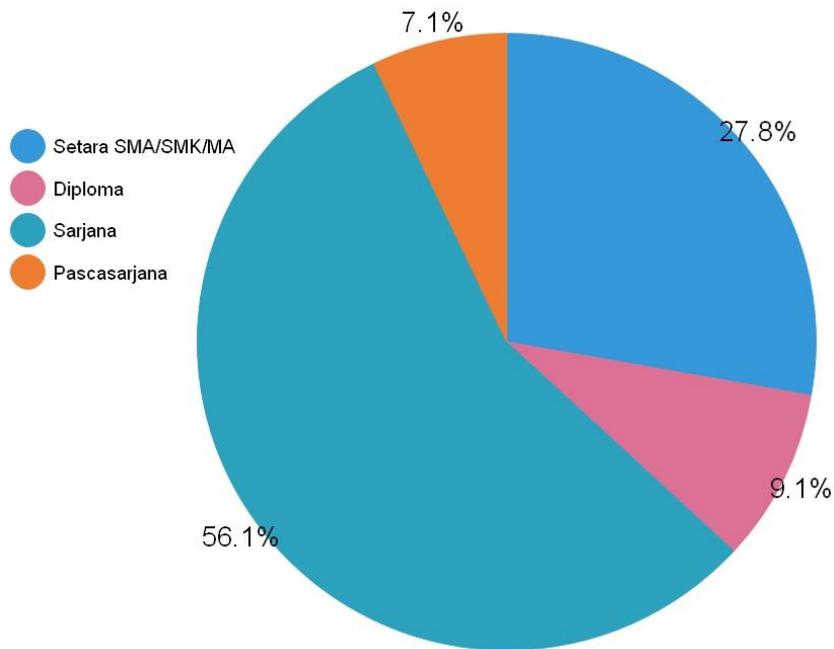
Pada gambar diagram lingkaran di atas ditampilkan data identitas operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) jenis jabatan di instansinya. Dari hasil diagram lingkaran tersebut, diperoleh bahwa dari total 187 orang responden yang mengisi instrumen analisis BOP pada kegiatan bimbingan teknis tingkat kabupaten/kota, ada 36 orang (19,3%) jabatan di instansinya adalah sebagai kepala/wakil lembaga, 29 orang (15,5%) jabatan di instansinya sebagai operator, 2 orang (1,1%) jabatan di instansinya sebagai pejabat struktural, 29 orang (15,5%) jabatan di instansinya sebagai pengajar (guru), 71 orang (38,0%) jabatan di instansinya sebagai staf administrasi, dan 20 orang (10,7%) jabatan di instansinya sebagai staf teknis.



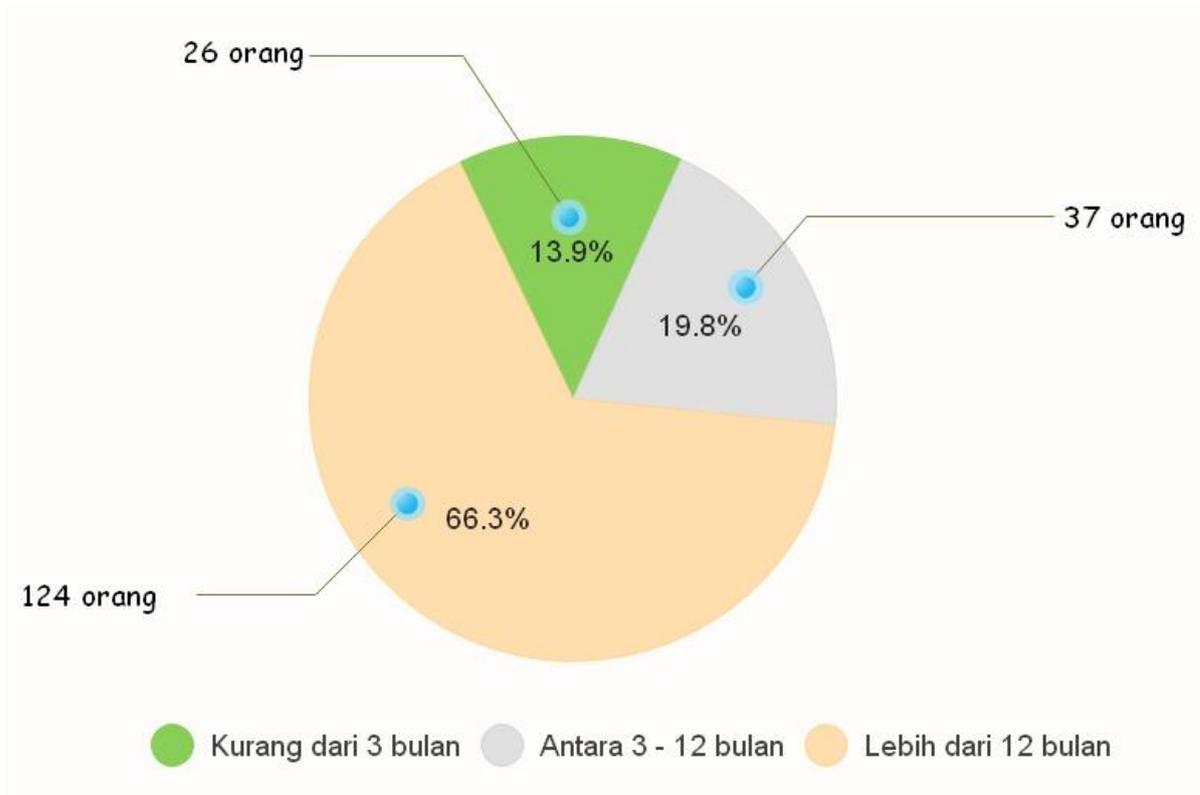
Gambar 4.12. Diagram Lingkaran Status Kepegawaian Responden Tingkat Kabupaten/Kota

Gambar 4.12 yang ditunjukkan di atas menampilkan diagram lingkaran dari data identitas operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat menurut status kepegawaian. Diketahui bahwa 64,7 % atau setara 121 orang operator satuan pendidikan Pendidikan masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis tingkat kabupaten/kota adalah pegawai tetap, dan sisanya sebesar 35,3% atau sebanyak 66 orang memiliki status pegawai tidak tetap.

Hasil diagram lingkaran data identitas operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat menurut kualifikasi pendidikan terakhir yang ditampilkan pada Gambar 4.13 di atas menunjukkan bahwa operator satuan pendidikan yang mengisi instrument analisis paling banyak berpendidikan sarjana (S1), yaitu sebanyak 105 orang atau setara 56,1%. Kualifikasi pendidikan terakhir yang lain yaitu setara SMA/SMK/MA sebesar 27,8 % (52 orang), kemudian Diploma sebesar 9,1 % (17 orang), dan yang paling sedikit adalah berpendidikan terakhir pascasarjana hanya 13 orang atau setara dengan 7,1%.



Gambar 4.13. Diagram Lingkaran Kualifikasi Pendidikan Terakhir Responden Tingkat Kabupaten/Kota



Gambar 4.14. Diagram Lingkaran Lama Bertugas Responden Tingkat Kabupaten/Kota

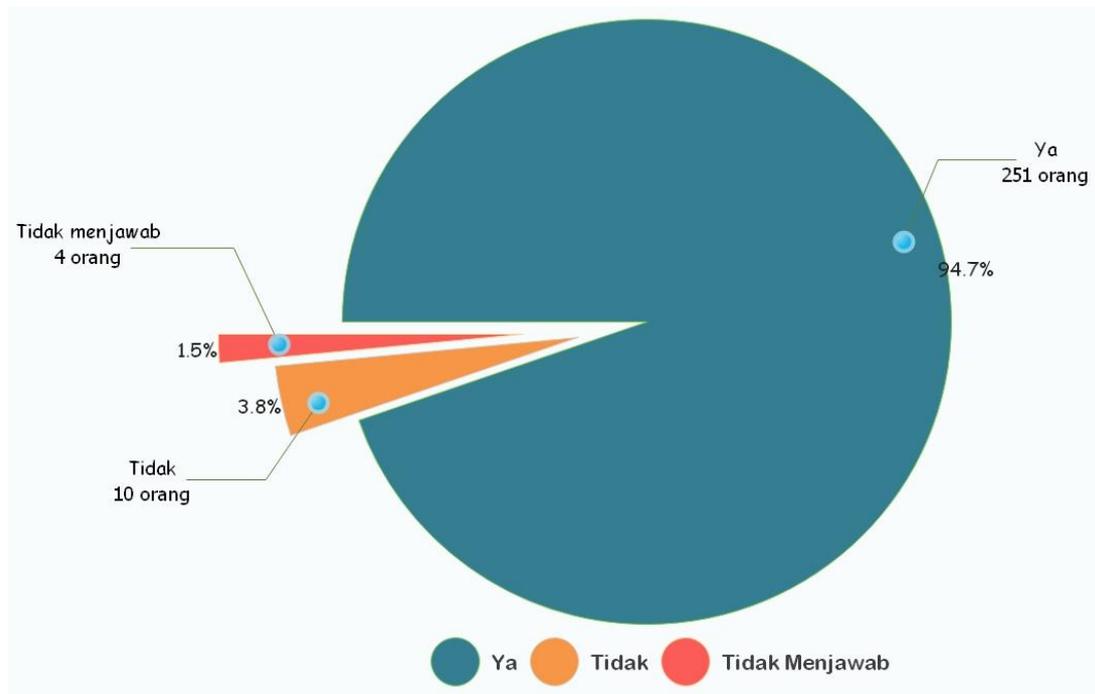
Gambar 4.14 yang menunjukkan diagram lingkaran data identitas operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat menurut lama bertugas sebagai pengelola data (operator). Dari hasil yang ditampilkan diketahui bahwa operator

dengan lama bertugas kurang dari 3 bulan jumlahnya paling sedikit, yaitu hanya 26 orang (13,9%), selanjutnya yang lama bertugas antara 3 - 12 bulan sebanyak 37 orang (19,8%), dan yang paling banyak adalah yang bertugas lebih dari 12 bulan sebanyak 124 orang (66,3%).

4.3. Pemahaman Responden Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)

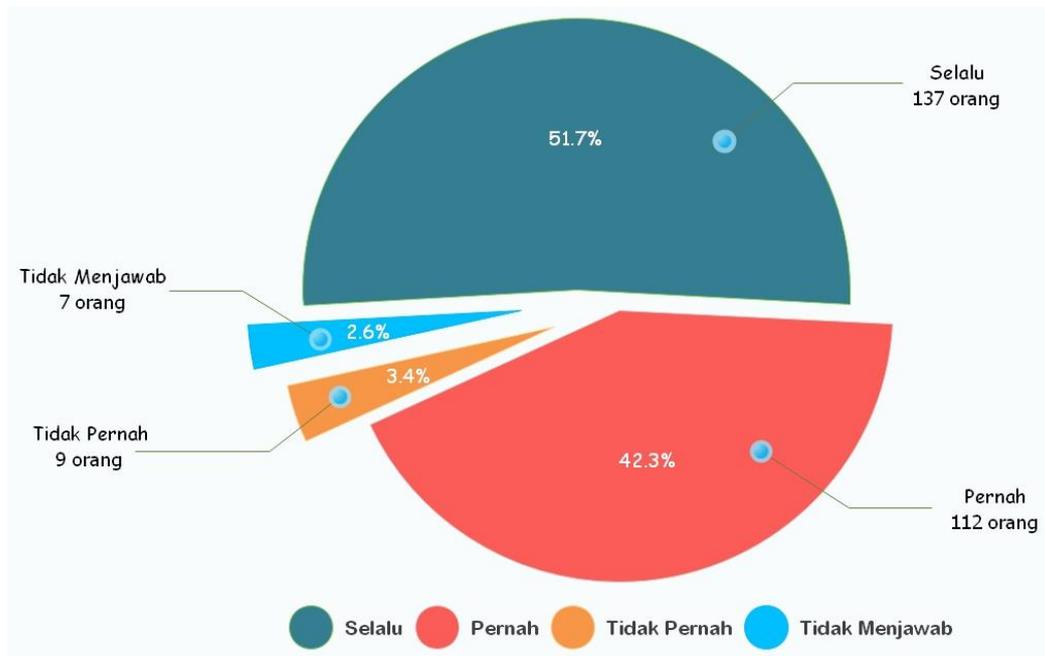
4.3.1. Pemahaman Responden Tingkat Provinsi Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)

Pemahaman operator dinas pendidikan kabupaten/kota terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) ditampilkan dalam berbagai pertanyaan yang diajukan melalui instrument analisis, yang disampaikan pada saat kegiatan bimbingan teknis tingkat provinsi. Berikut ini akan dilakukan pembahasan hasil dari jawaban operator dinas Pendidikan kabupaten/kota mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait BOP Kesetaraan.



Gambar 4.15. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah Anda mengetahui tentang BOP?”

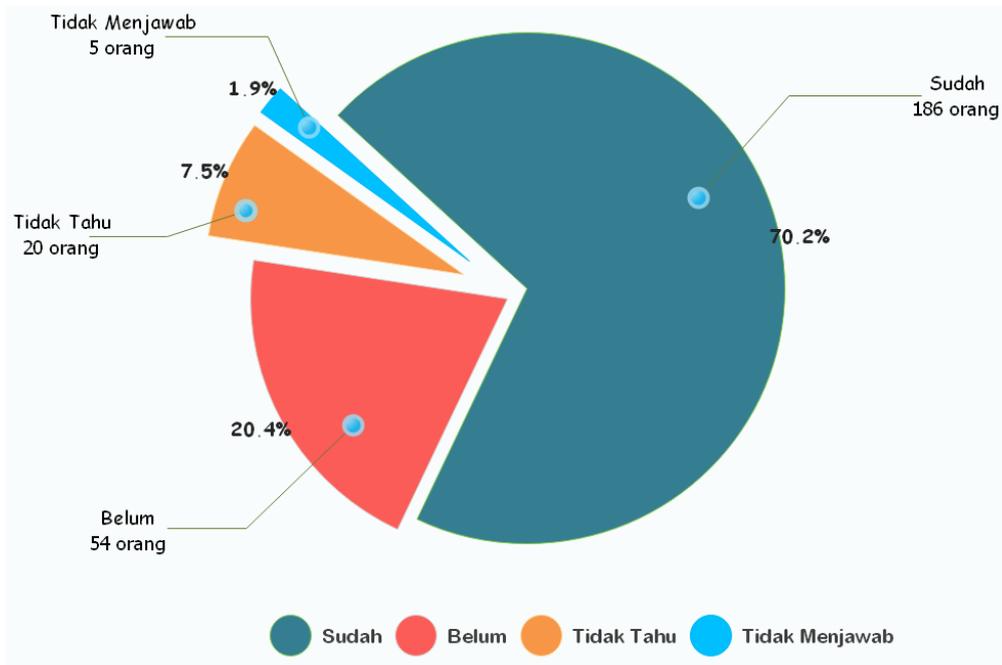
Dari hasil yang ditampilkan pada Gambar 4.15 di atas, diketahui bahwa dari 265 operator data PAUD dan Dikmas PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimbingan teknis tingkat provinsi dan mengisi instrument analisis, pada pertanyaan apakah Anda mengetahui tentang BOP?, yang menjawab ya ada 251 orang atau 94,7%, 10 orang atau setara 3,8% menjawab tidak, dan yang tidak menjawab ada 4 orang atau sebesar 1,5%. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sudah banyak yang tahu tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).



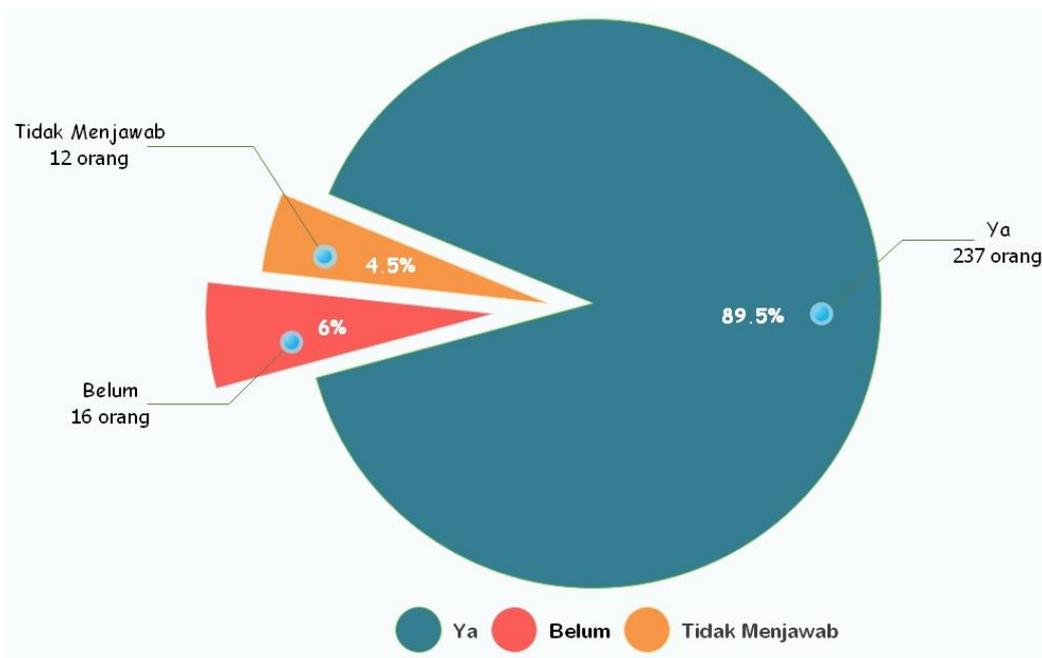
Gambar 4.16. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah lembaga pendidikan Anda/di wilayah Anda pernah menerima BOP?”

Gambar 4.16 di atas menunjukkan diagram lingkaran jawaban peserta bimbingan teknis tingkat provinsi pada pertanyaan apakah lembaga pendidikan Anda/di wilayah Anda pernah menerima BOP?. Dari hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa yang menjawab selalu sebesar 51,7% atau setara 137 orang, yang menjawab pernah ada sebesar 42,3% atau setara 112 orang, yang menjawab tidak pernah ada 9 orang (3,4%), dan ada juga yang tidak menjawab sebanyak 7 orang (2,6%).

Berdasarkan Gambar 4.17 di bawah diketahui bahwa dari 265 operator data PAUD dan Dikmas PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimbingan teknis tingkat provinsi dan mengisi instrument analisis, pada pertanyaan apakah pengelola BOP sudah mengikuti sosialisasi/pelatihan terkait BOP?, yang menjawab sudah ada 186 orang atau setara 70,2%, yang menjawab belum ada 20,4% (54 orang), yang menjawab tidak tahu ada sebanyak 20 orang (7,5%), dan yang tidak menjawab ada 5 orang (1,9%).



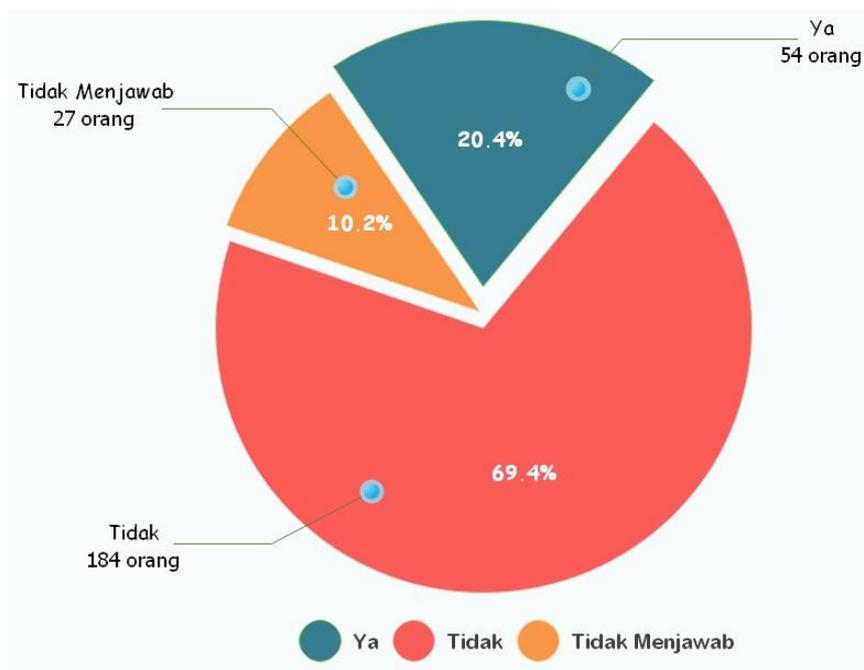
Gambar 4.17. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah pengelola BOP sudah mengikuti sosialisasi/pelatihan terkait BOP?”



Gambar 4.18. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah Anda memiliki juknis BOP?”

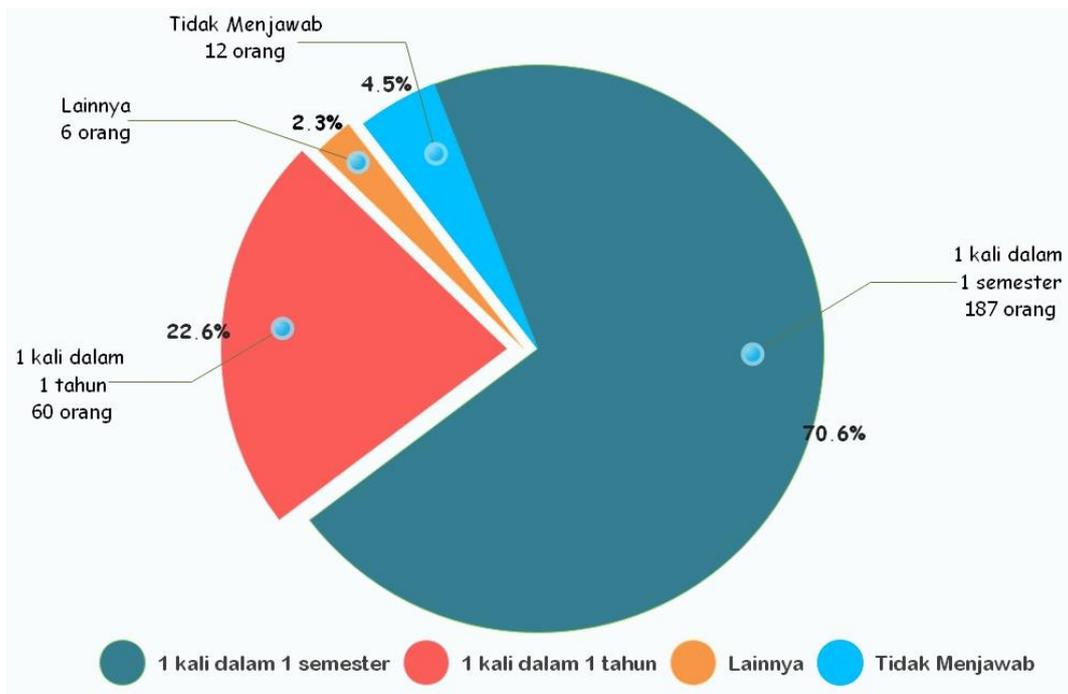
Pada gambar diagram lingkaran jawaban peserta bimbingan teknis tingkat provinsi, operator data PAUD dan Dikmas dari PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dari pertanyaan “Apakah Anda memiliki juknis BOP?”, diperoleh hasil bahwa jawaban yang paling banyak adalah ya, sebesar 89,5% atau setara 237 orang. Selain jawaban ya, ada juga yang

menjawab belum sebanyak 16 orang atau 6%, dan terakhir ada yang tidak menjawab sebanyak 12 orang atau 4,5%.



Gambar 4.19. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah masih mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan BOP?”

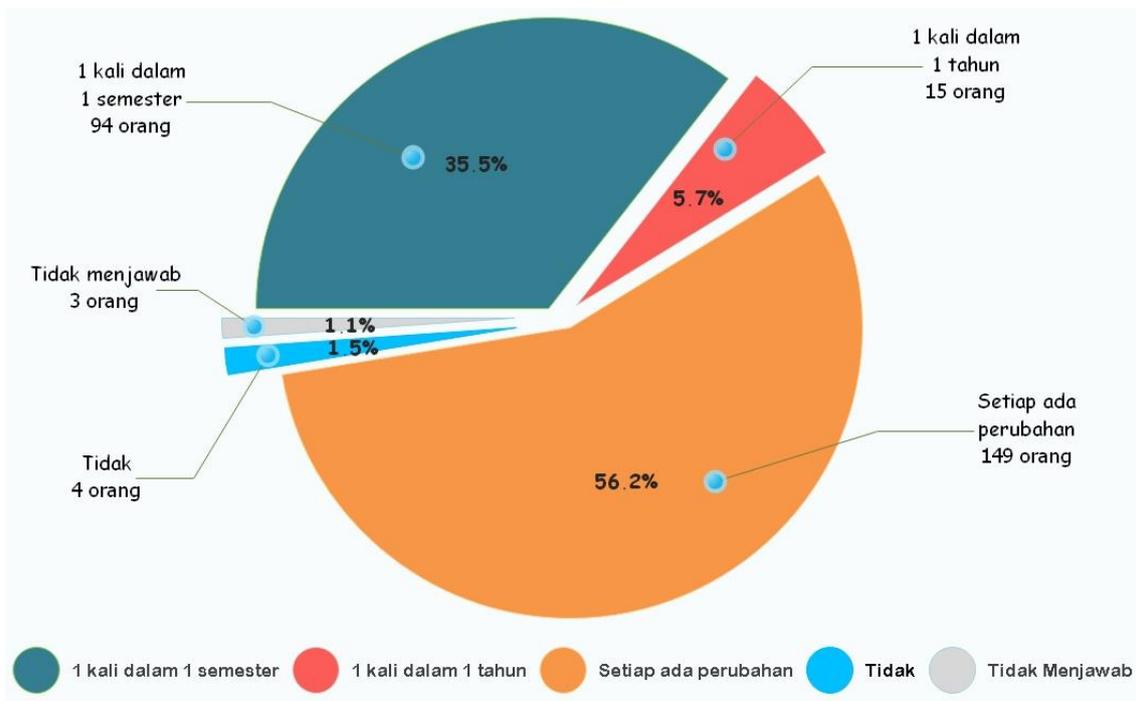
Hasil diagram lingkaran jawaban operator data PAUD dan Dikmas dari PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimbingan teknis tingkat provinsi pada pertanyaan “Apakah masih mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan BOP?”, yang ditampilkan pada Gambar 4.19 di atas menunjukkan bahwa responden yang mengisi instrument analisis paling banyak menjawab tidak, yaitu sebesar 69,4% atau setara 184 orang. Selain itu, ada yang menjawab ya sebanyak 54 orang (20,4%) dan yang tidak menjawab sebesar 10,2% (27 orang). Sehingga dapat dikatakan bahwa peserta bimbingan teknis tingkat provinsi sudah banyak yang tidak mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan BOP Kesetaraan.



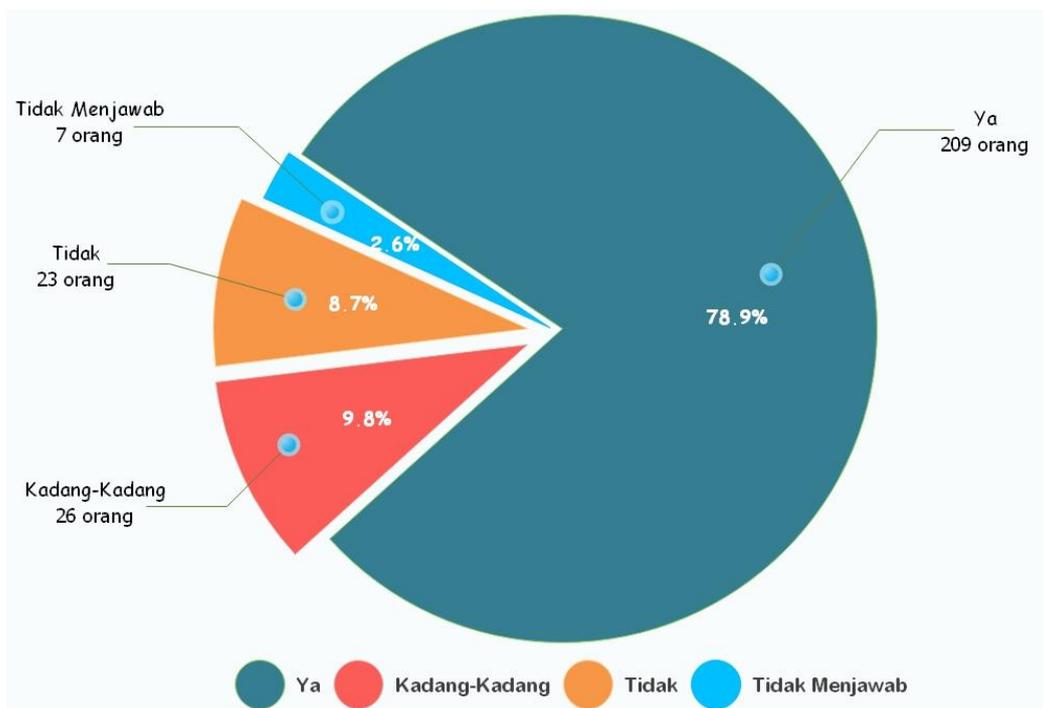
Gambar 4.20. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Berapa kali dana program BOP diterima lembaga?”

Gambar 4.20 di atas menunjukkan diagram lingkaran jawaban peserta bimbingan teknis tingkat provinsi pada pertanyaan Berapa kali dana program BOP diterima lembaga? Dari hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa yang menjawab 1 kali dalam 1 semester sebesar 70,6% atau setara 187 orang, yang menjawab 1 kali dalam 1 tahun ada sebesar 22,6% atau setara 60 orang, yang menjawab lainnya ada 6 orang (2,3%), dan ada juga yang tidak menjawab sebanyak 12 orang (4,5%).

Berdasarkan Gambar 4.21 di bawah diketahui bahwa dari 265 operator data PAUD dan Dikmas PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimbingan teknis tingkat provinsi dan mengisi instrument analisis, pada pertanyaan apakah lembaga memperbaiki/melengkapi data secara berkala?, yang menjawab 1 kali dalam 1 semester sebesar 35,5% atau setara dengan 94 orang, yang menjawab 1 kali dalam 1 tahun ada 5,7% (15 orang), yang menjawab setiap ada perubahan sebanyak 149 orang (56,2%), yang menjawab tidak ada 4 orang (1,5%) dan yang tidak menjawab ada 3 orang (1,1%).



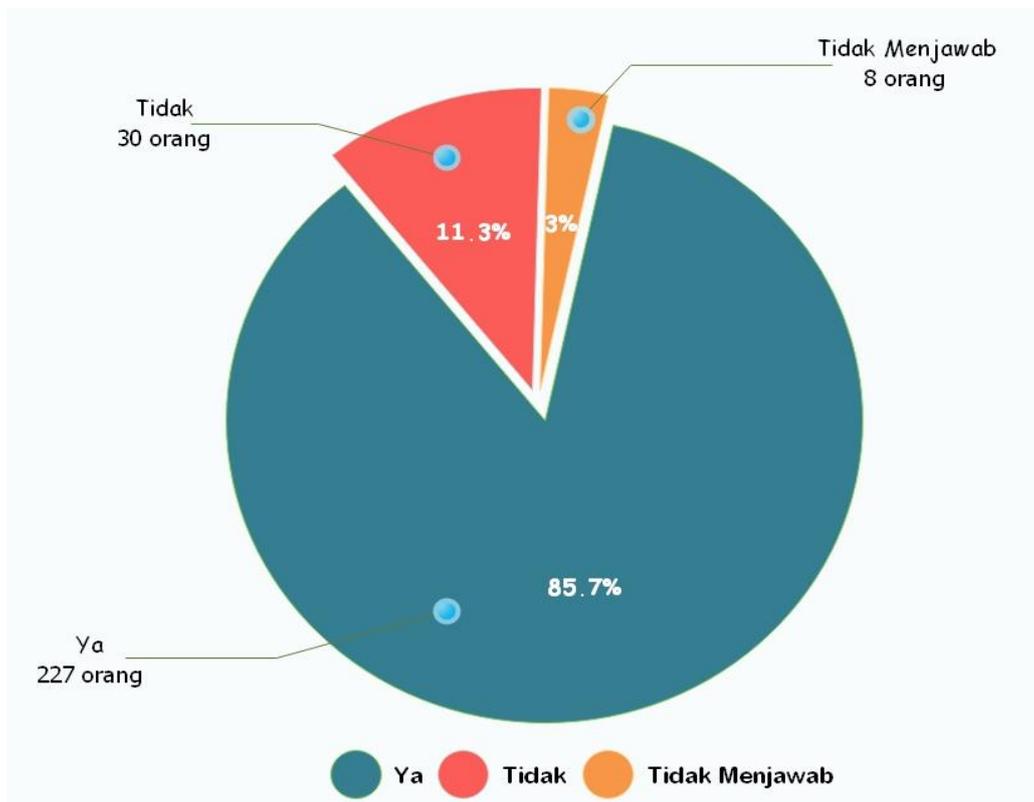
Gambar 4.21. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah lembaga memperbaiki/melengkapi data secara berkala?”



Gambar 4.22. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Apakah Anda mengetahui batas waktu melengkapi data untuk pengajuan BOP?”

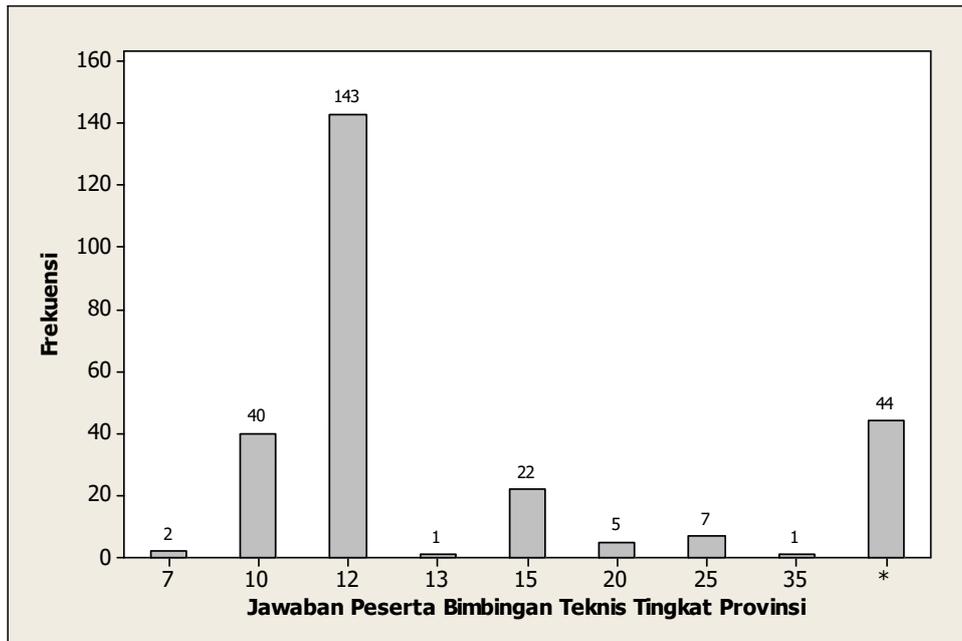
Dari hasil yang ditampilkan pada Gambar 4.22 di atas, diketahui bahwa dari 265 operator data PAUD dan Dikmas PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimbingan teknis tingkat provinsi

dan mengisi instrument analisis, pada pertanyaan apakah Anda mengetahui batas waktu melengkapi data untuk pengajuan BOP?, yang menjawab ya ada 209 orang atau 78,9%, 26 orang atau setara 9,8% menjawab kadang-kadang, 23 orang (8,7%) menjawab tidak, dan yang tidak menjawab ada 7 orang atau sebesar 2,6%. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sudah banyak yang mengetahui batas waktu melengkapi data untuk pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).



Gambar 4.23. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Adakah syarat minimal jumlah peserta didik di setiap rombongan belajar untuk mendapat BOP?”

Pada gambar diagram lingkaran jawaban responden tingkat provinsi, operator data PAUD dan Dikmas dari PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dari pertanyaan “Adakah syarat minimal jumlah peserta didik di setiap rombongan belajar untuk mendapat BOP?”, diperoleh hasil bahwa jawaban yang paling banyak adalah ya, sebesar 85,7% atau setara 227 orang. Selain jawaban ya, ada juga yang menjawab tidak sebanyak 30 orang atau 11,3%, dan terakhir ada yang tidak menjawab sebanyak 8 orang atau 3%.

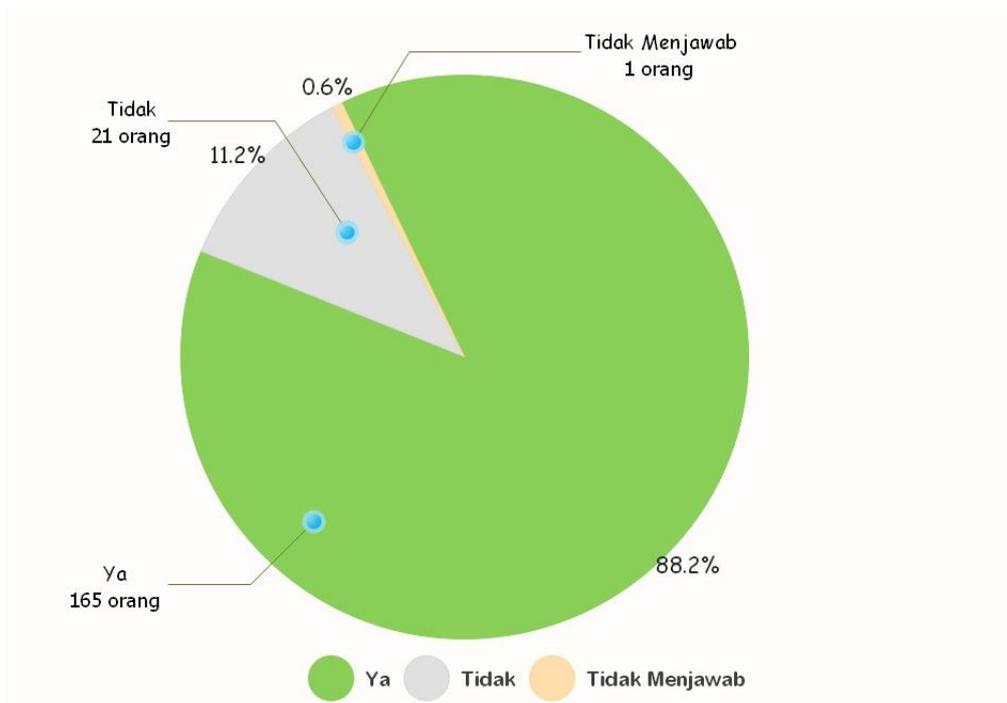


Gambar 4.24. Diagram Batang Jawaban Responden Tingkat Provinsi pada Pertanyaan “Berapa jumlah peserta didik minimal dalam satu rombongan belajar?”

Pertanyaan berapa jumlah peserta didik minimal dalam satu rombongan belajar? Merupakan pertanyaan terbuka, dan tidak terdapat pilihan jawaban. Dari hasil jawaban yang diperoleh, ada beberapa macam jenis jawaban, ada 7, 10, 12, 13, 15, 20, 25, 35, dan ada juga yang tidak menjawab. Dilihat dari jumlah peserta, sebanyak 143 orang menjawab angka 12, dan ada 40 orang menjawab angka 10, selain itu yang tidak menjawab ada 44 orang.

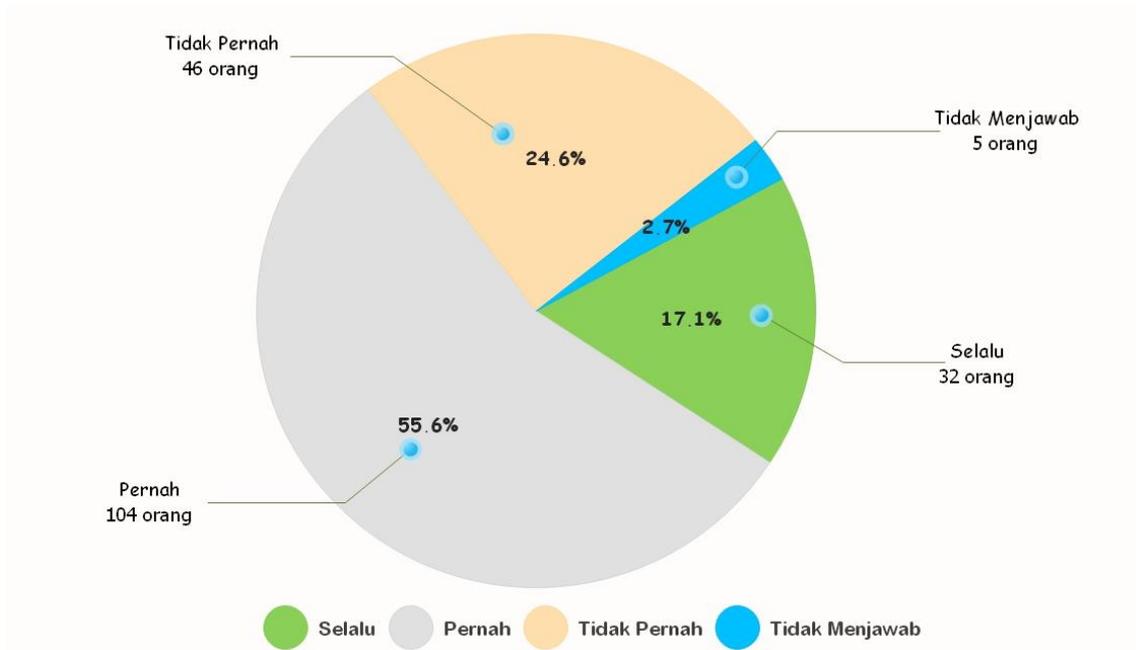
4.3.2. Pemahaman Responden Tingkat Kabupaten/Kota Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)

Pemahaman operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) ditampilkan dalam berbagai pertanyaan yang diajukan melalui instrument analisis, yang disampaikan pada saat kegiatan bimbingan teknis tingkat kabupaten/kota. Berikut ini akan dilakukan pembahasan hasil dari jawaban operator satuan pendidikan mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait BOP Kesetaraan.



Gambar 4.25. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah Anda mengetahui tentang BOP?”

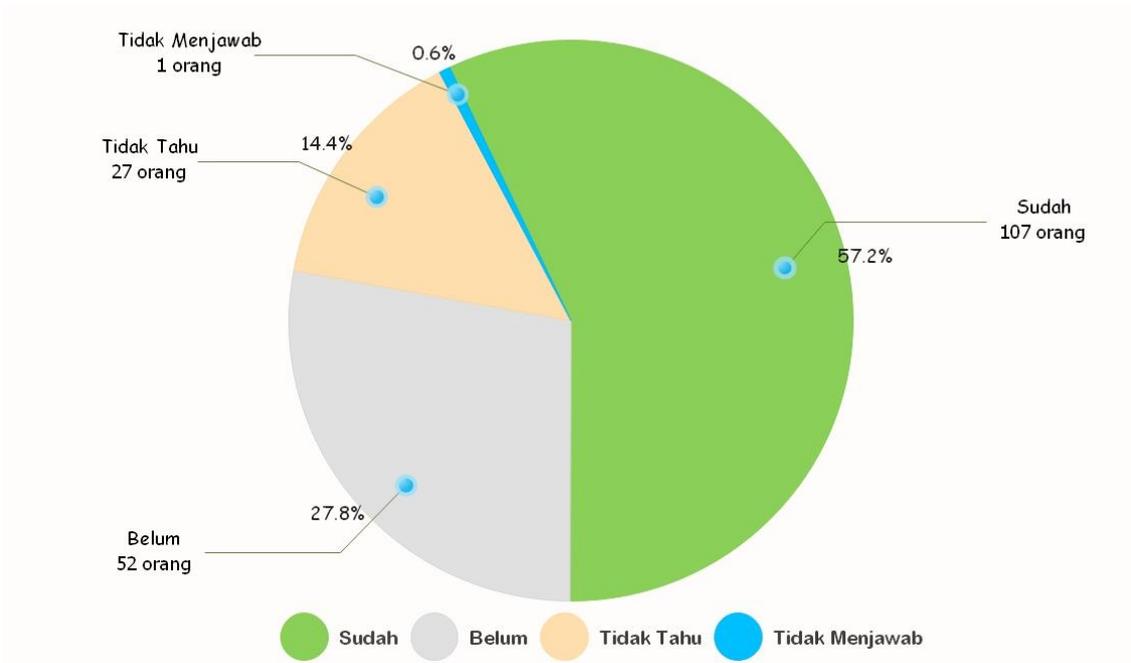
Dari hasil yang ditampilkan pada Gambar 4.25 di atas, diketahui bahwa dari 187 operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat, pada pertanyaan apakah Anda mengetahui tentang BOP?, yang menjawab ya ada 165 orang atau 88,2%, 21 orang atau setara 11,2% menjawab tidak, dan yang tidak menjawab ada 1 orang atau sebesar 0,6%. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat sudah banyak yang tahu tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).



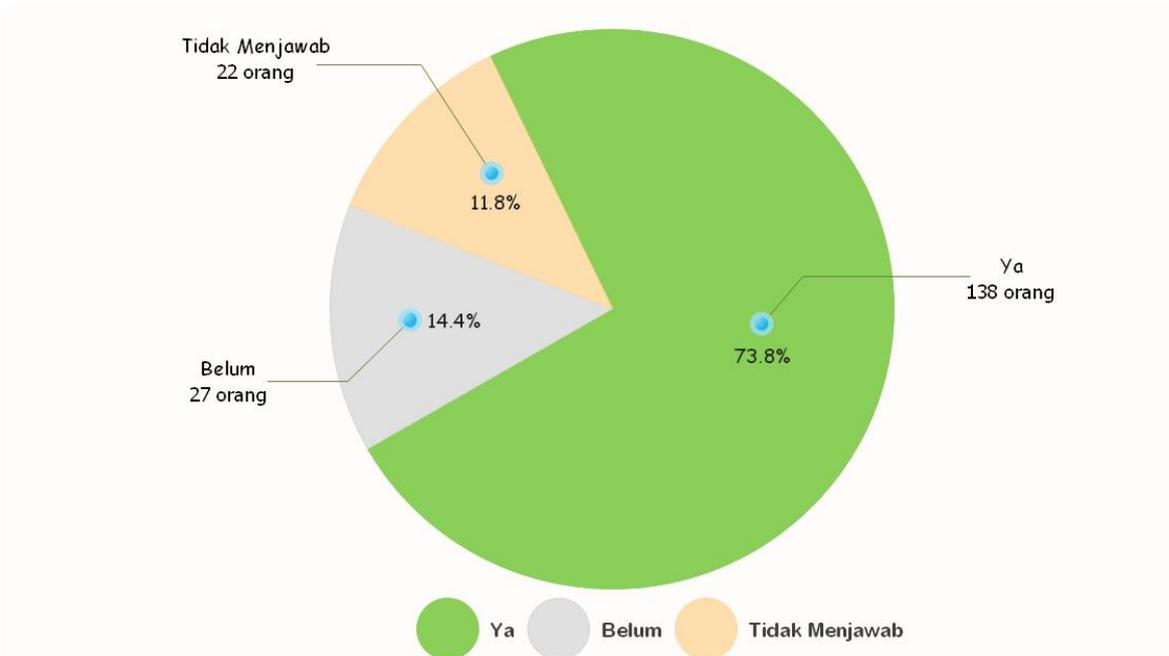
Gambar 4.26. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah lembaga pendidikan Anda/di wilayah Anda pernah menerima BOP?”

Gambar 4.26 di atas menunjukkan diagram lingkaran jawaban responden tingkat Kabupaten/Kota pada pertanyaan apakah lembaga pendidikan Anda/di wilayah Anda pernah menerima BOP?. Dari hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa yang menjawab selalu sebesar 17,1% atau setara 32 orang, yang menjawab pernah ada sebesar 55,6% atau setara 104 orang, yang menjawab tidak pernah ada 46 orang (24,6%), dan ada juga yang tidak menjawab sebanyak 5 orang (2,7%).

Berdasarkan Gambar 4.27 di bawah diketahui bahwa dari 187 operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat yang menjadi responden tingkat Kabupaten/Kota, pada pertanyaan apakah pengelola BOP sudah mengikuti sosialisasi/pelatihan terkait BOP?, yang menjawab sudah ada 107 orang atau setara 57,2%, yang menjawab belum ada 27,8% (52 orang), yang menjawab tidak tahu ada sebanyak 27 orang (14,4%), dan yang tidak menjawab ada 1 orang (0,5%).



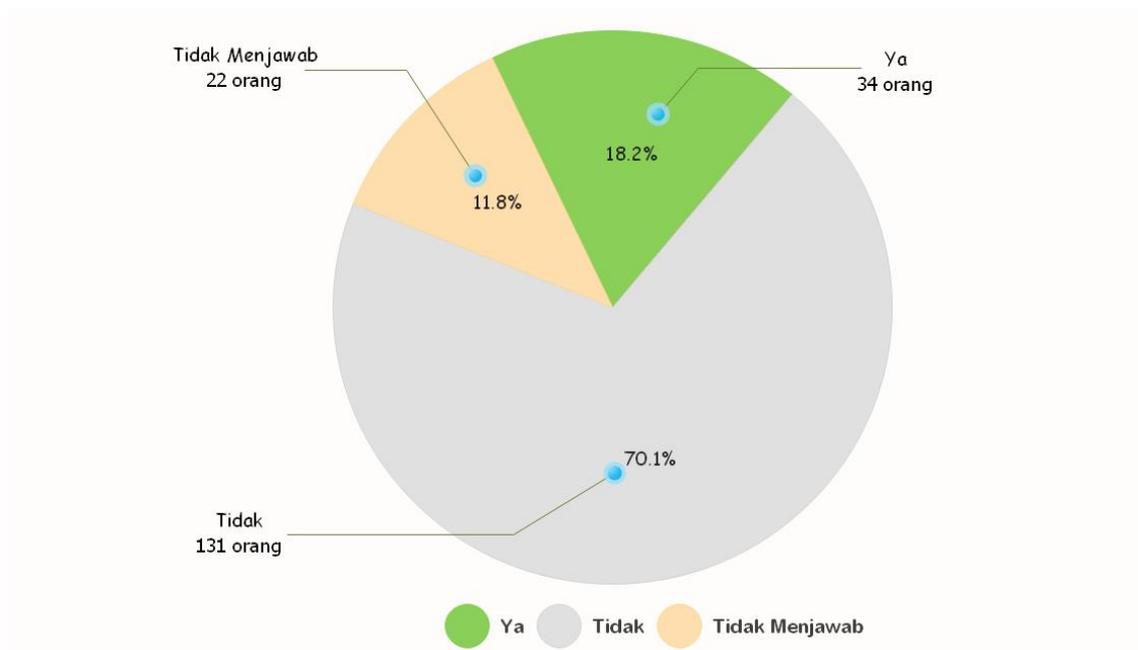
Gambar 4.27. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah pengelola BOP sudah mengikuti sosialisasi/pelatihan terkait BOP?”



Gambar 4.28. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah Anda memiliki juknis BOP?”

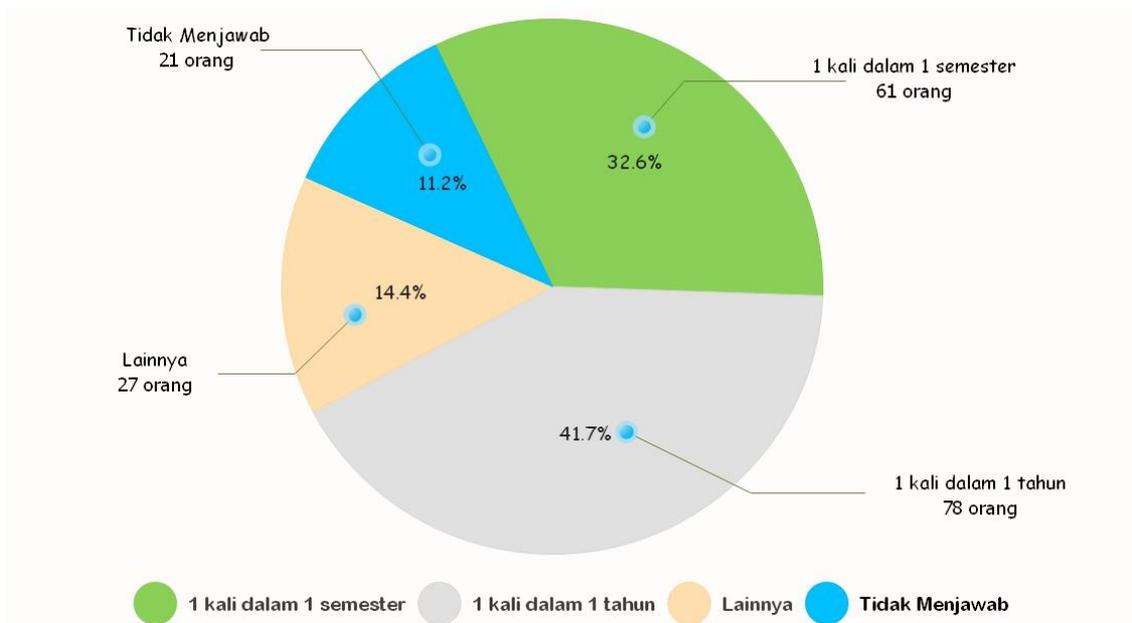
Pada gambar diagram lingkaran jawaban responden tingkat Kabupaten/Kota, operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat, dari pertanyaan “Apakah Anda memiliki juknis BOP?”, diperoleh hasil bahwa jawaban yang paling banyak adalah ya, sebesar 73,8% atau setara 138 orang.

Selain jawaban ya, ada juga yang menjawab belum sebanyak 27 orang atau 14,4%, dan terakhir ada yang tidak menjawab sebanyak 22 orang atau 11,8%.



Gambar 4.29. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah masih mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan BOP?”

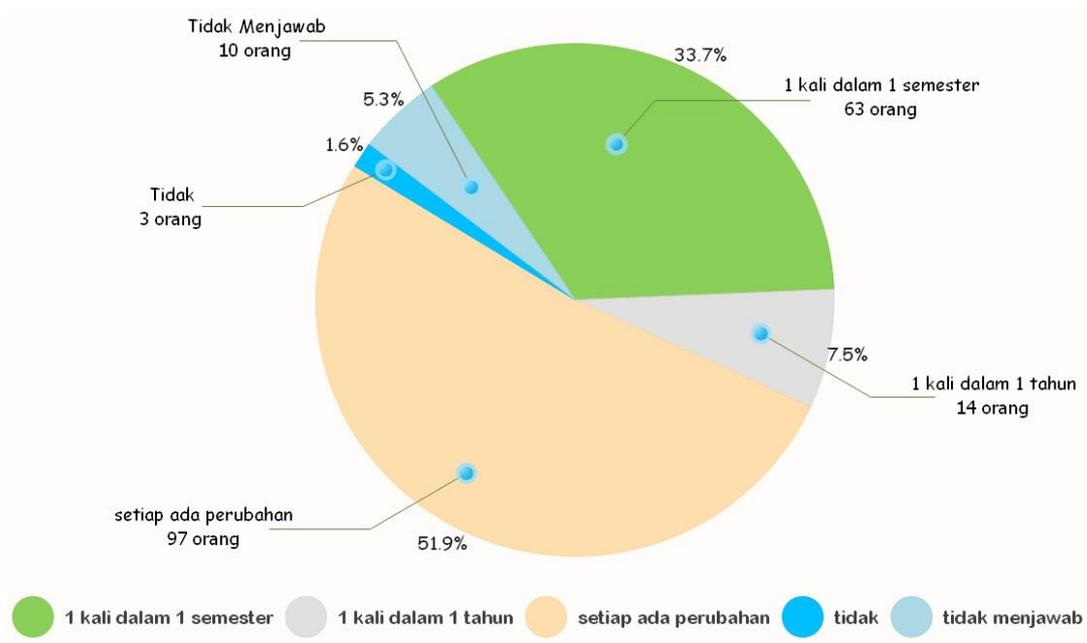
Hasil diagram lingkaran jawaban operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat yang menjadi responden tingkat Kabupaten/Kota pada pertanyaan “Apakah masih mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan BOP?”, yang ditampilkan pada Gambar 4.29 di atas menunjukkan bahwa responden yang mengisi instrument analisis paling banyak menjawab tidak, yaitu sebesar 70,1% atau setara 131 orang. Selain itu, ada yang menjawab ya sebanyak 34 orang (18,2%) dan yang tidak menjawab sebesar 11,8% (22 orang). Sehingga dapat dikatakan bahwa peserta bimbingan teknis tingkat Kabupaten/Kota sudah banyak yang tidak mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan BOP Kesetaraan.



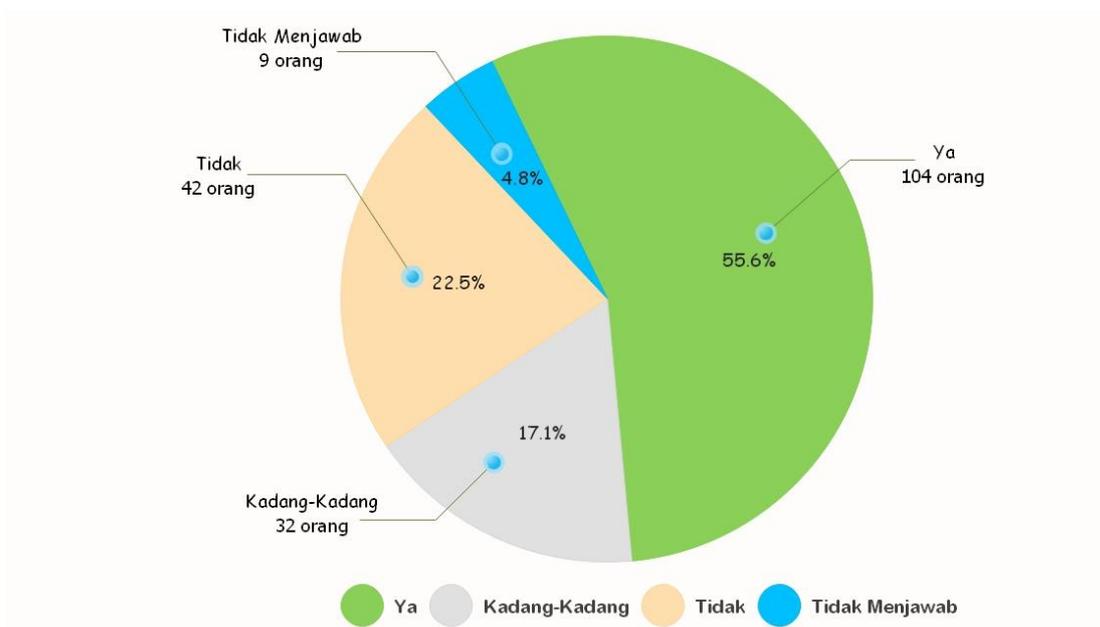
Gambar 4.30. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Berapa kali dana program BOP diterima lembaga?”

Gambar 4.30 di atas menunjukkan diagram lingkaran jawaban responden tingkat kabupaten/kota pada pertanyaan Berapa kali dana program BOP diterima lembaga? Dari hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa yang menjawab 1 kali dalam 1 semester sebesar 32,6% atau setara 61 orang, yang menjawab 1 kali dalam 1 tahun ada sebesar 41,7% atau setara 78 orang, yang menjawab lainnya ada 27 orang (14,4%), dan ada juga yang tidak menjawab sebanyak 21 orang (11,2%).

Berdasarkan Gambar 4.31 di bawah diketahui bahwa dari 187 operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat yang menjadi responden tingkat kabupaten/kota, pada pertanyaan apakah lembaga memperbaiki/melengkapi data secara berkala?, yang menjawab 1 kali dalam 1 semester sebesar 33,7% atau setara dengan 63 orang, yang menjawab 1 kali dalam 1 tahun ada 7,5% (14 orang), yang menjawab setiap ada perubahan sebanyak 97 orang (51,9%), yang menjawab tidak 3 orang (1,6%) dan yang tidak menjawab ada 10 orang (5,3%).



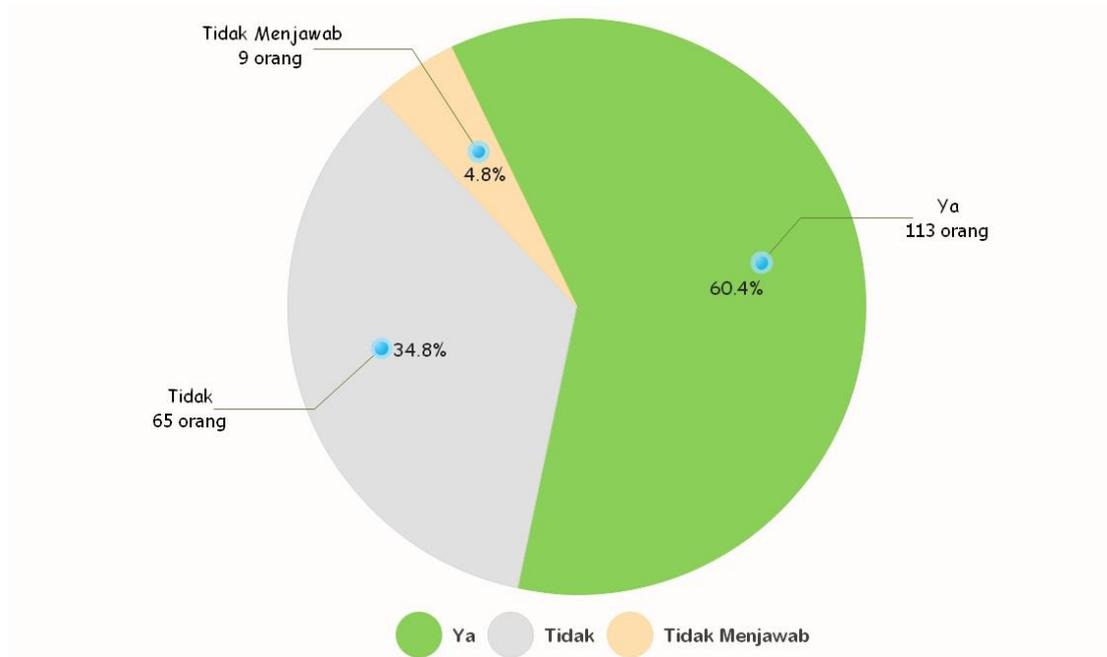
Gambar 4.31. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah lembaga memperbaiki/melengkapi data secara berkala?”



Gambar 4.32. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Apakah Anda mengetahui batas waktu melengkapi data untuk pengajuan BOP?”

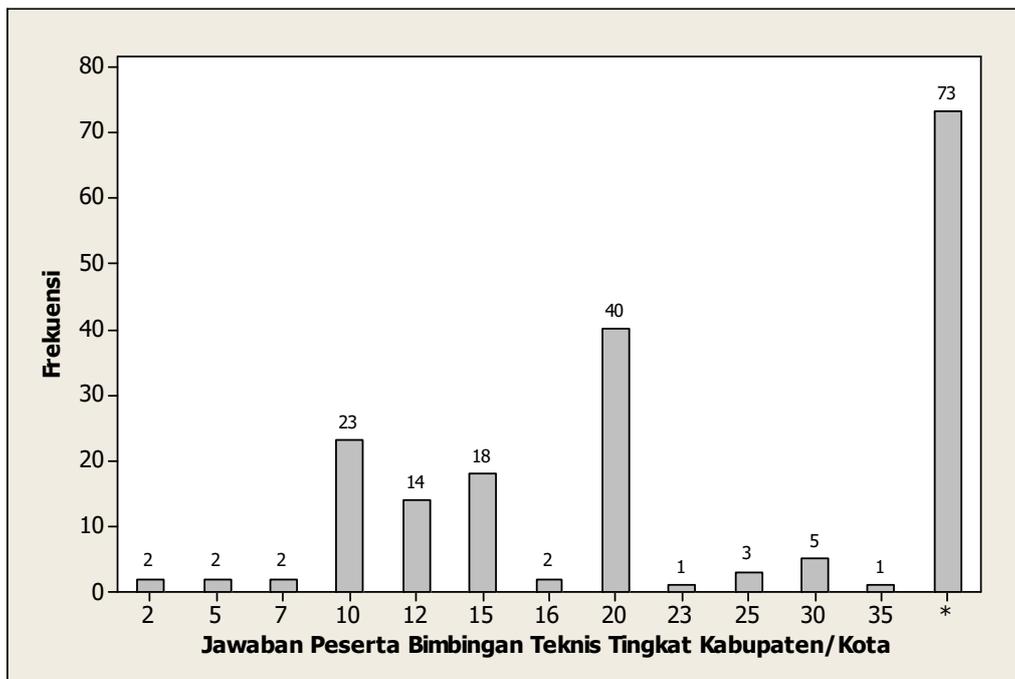
Dari hasil yang ditampilkan pada Gambar 4.32 di atas, diketahui bahwa dari 187 operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat yang menjadi responden tingkat kabupaten/kota, pada pertanyaan apakah Anda mengetahui batas waktu melengkapi data untuk pengajuan BOP?, yang menjawab ya ada

104 orang atau 55,6%, 32 orang atau setara 17,1% menjawab kadang-kadang, 42 orang (22,5%) menjawab tidak, dan yang tidak menjawab 9 orang atau sebesar 4,8%. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa operator satuan pendidikan sudah banyak yang mengetahui batas waktu melengkapi data untuk pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).



Gambar 4.33. Diagram Lingkaran Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Adakah syarat minimal jumlah peserta didik di setiap rombongan belajar untuk mendapat BOP?”

Pada gambar diagram lingkaran jawaban responden tingkat kabupaten/kota, operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat, dari pertanyaan “Adakah syarat minimal jumlah peserta didik di setiap rombongan belajar untuk mendapat BOP?”, diperoleh hasil bahwa jawaban yang paling banyak adalah ya, sebesar 60,4% atau setara 113 orang. Selain jawaban ya, ada juga yang menjawab tidak sebanyak 65 orang atau 34,8%, dan terakhir ada yang tidak menjawab sebanyak 9 orang atau 4,8%.



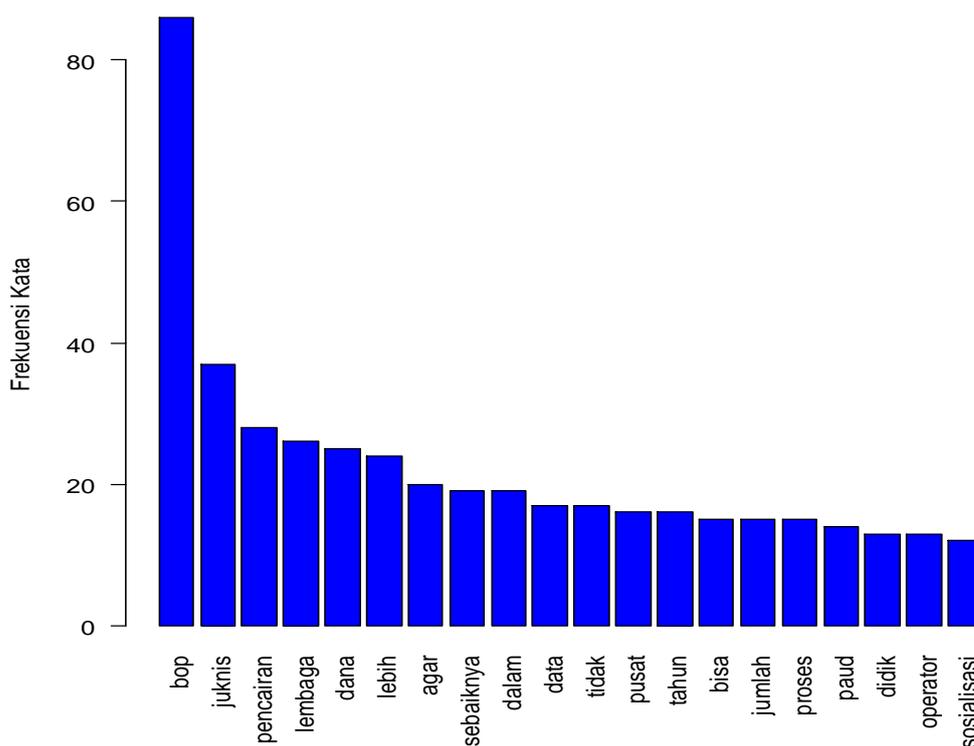
Gambar 4.34. Diagram Batang Jawaban Responden Tingkat Kabupaten/Kota pada Pertanyaan “Berapa jumlah peserta didik minimal dalam satu rombongan belajar?”

Pertanyaan berapa jumlah peserta didik minimal dalam satu rombongan belajar? Merupakan pertanyaan terbuka, dan tidak terdapat pilihan jawaban. Dari hasil jawaban yang diperoleh, ada beberapa macam jenis jawaban, ada 2, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 20, 23, 25, 30, 35 dan ada juga yang tidak menjawab. Dilihat dari jumlah peserta, sebanyak 40 orang menjawab angka 20, dan ada 23 orang menjawab angka 10, selain itu yang paling banyak adalah tidak menjawab yaitu ada 73 orang.

4.4. Saran dan Masukan dari Responden Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)

Pertanyaan saran dan masukan dalam instrumen analisis ini diberikan dengan pertanyaan terbuka, sehingga seluruh responden bisa menjawab sesuai dengan apapun yang dirasakan. Pembahasan saran dan masukan akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu saran dan masukan dari operator data PAUD dan Dikmas PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang diperoleh pada saat bimbingan teknis tingkat provinsi. Yang kedua adalah pembahasan saran dan masukan dari jawaban satuan pendidikan Pendidikan

Kata Yang Paling Sering Muncul

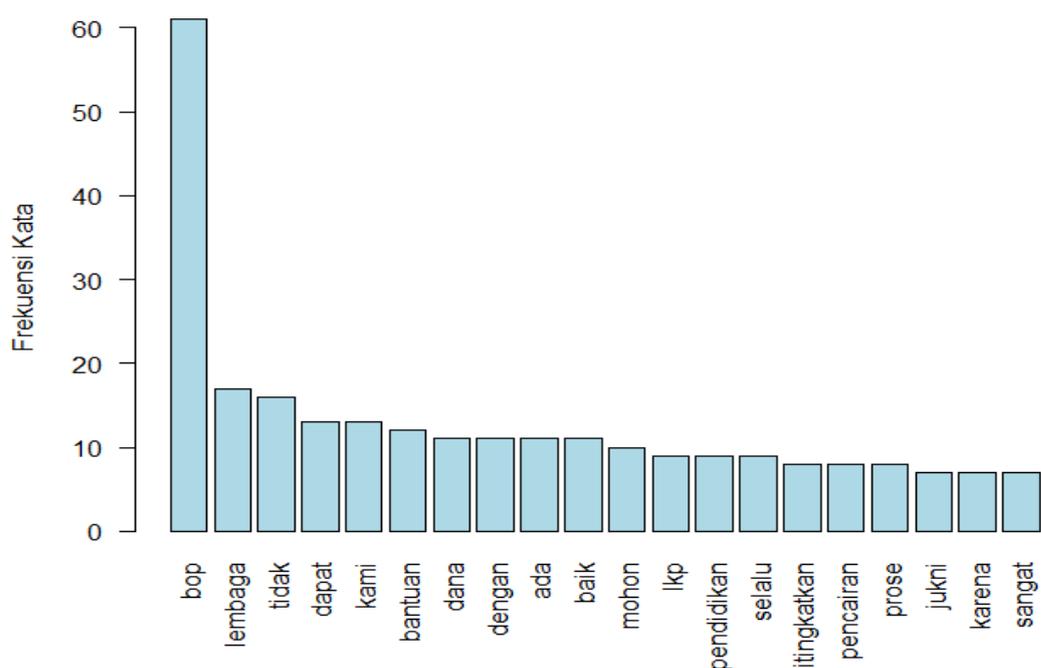


Gambar 4.36. Grafik Kata Yang Paling Sering Muncul Dalam Data Saran dari Responden Tingkat Provinsi Terkait BOP kesetaraan

Berdasarkan wordcloud yang ditampilkan pada Gambar 4.35, diperoleh hasil bahwa kata yang paling sering muncul dalam saran yang disampaikan responden tingkat provinsi adalah bop, yang terlihat bahwa kata tersebut ukurannya hurufnya paling besar, kata selanjutnya juknis, pencairan, lembaga, dana, dan seterusnya. Hasil tersebut didukung dengan hasil tampilan grafik kata yang paling sering muncul pada Gambar 4.36, yang menunjukkan jumlah frekuensi kata-kata yang paling sering muncul, kata bop muncul sebanyak lebih dari 80 kali, frekuensi tertinggi selanjutnya adalah kata juknis, pencairan, lembaga, dana, dan seterusnya.

Dari hasil yang ditampilkan pada wordcloud dan grafik frekuensi kata yang paling sering muncul, selanjutnya diperoleh beberapa saran yang paling banyak diusulkan oleh peserta bimbingan teknis tingkat provinsi Operator data PAUD dan Dikmas PP/BP-PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait BOP Kesetaraan. Berikut ini ditampilkan tabel saran dan masukan yang diperoleh.

Kata Yang Paling Sering Muncul



Gambar 4.38. Grafik Kata Yang Paling Sering Muncul Dalam Data Saran dari Responden Tingkat Kabupaten/Kota Terkait BOP kesetaraan

Berdasarkan *wordcloud* yang ditampilkan pada Gambar 4.37, diperoleh hasil bahwa kata yang paling sering muncul dalam saran yang disampaikan responden tingkat kabupaten/kota adalah bop, yang terlihat bahwa kata tersebut ukurannya hurufnya paling besar, kata selanjutnya lembaga, tidak, dapat, kami, bantuan, dana dan seterusnya. Hasil tersebut didukung dengan hasil tampilan grafik kata yang paling sering muncul pada Gambar 4.38, yang menunjukkan jumlah frekuensi kata-kata yang paling sering muncul, kata bop muncul sebanyak lebih dari 60 kali, frekuensi tertinggi selanjutnya adalah kata lembaga, tidak, dapat, kami, bantuan, dana, dengan, dan seterusnya.

Dari hasil yang ditampilkan pada *wordcloud* dan grafik frekuensi kata yang paling sering muncul, selanjutnya diperoleh beberapa saran yang paling banyak diusulkan oleh responden tingkat kabupaten/kota, operator satuan pendidikan Pendidikan Masyarakat terkait BOP Kesetaraan. Berikut ini ditampilkan tabel saran dan masukan yang diperoleh.

Tabel 4.5. Saran dan Masukan Terkait BOP Kesetaraan dari Responden Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Saran dan Masukan dari operator Satuan pendidikan Pendidikan
-----	--

	Masyarakat
1.	Semua peserta didik mendapatkan BOP
2.	Kepengurusan BOP di Pusat
3.	Dilancarkan dan dipermudah dalam penggunaan BOP
4.	Sosialisasi terkait BOP harus ditingkatkan
5.	Mohon diperhatikan untuk LKP yang jarang/tidak pernah menerima BOP
6.	Penerima BOP jangan dibatasi di usia 21 tahun
7.	Anggaran BOP lebih ditingkatkan

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari hasil analisis terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan jumlah peserta didik Pendidikan Kesetaraan dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat.
2. Responden tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota banyak yang sudah mengetahui tentang BOP Kesetaraan.
3. Responden tingkat provinsi banyak yang selalu menerima BOP Kesetaraan, dan responden tingkat kabupaten/kota banyak yang sudah pernah menerima BOP Kesetaraan.
4. Pengelola BOP tingkat kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan banyak yang sudah mengikuti sosialisasi/pelatihan terkait BOP Kesetaraan.
5. Responden tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota banyak yang sudah memiliki juknis BOP Kesetaraan.
6. Responden tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota banyak yang tidak mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan BOP.
7. Responden tingkat provinsi banyak yang menerima dana program BOP 1 kali dalam 1 semester, sedangkan tingkat kabupaten/kota 1 kali dalam 1 tahun.
8. Responden tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota banyak yang memperbaiki/melengkapi data secara berkala setiap ada perubahan.
9. Responden tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota banyak yang mengetahui batas waktu melengkapi data untuk pengajuan BOP.

10. Responden tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota banyak yang menjawab bahwa ada syarat minimal jumlah peserta didik di setiap rombongan belajar untuk mendapat BOP.
11. Responden tingkat provinsi banyak yang menjawab bahwa syarat jumlah peserta didik minimal dalam setiap rombongan belajar untuk dapat menerima BOP adalah 12 peserta didik, sedangkan jawaban peserta bimbingan teknis tingkat kabupaten/kota paling banyak adalah 20 peserta didik.

5.2. Saran

Saran dan masukan yang diperoleh dari responden tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah seperti berikut ini.

1. Sosialisasi/bimbingan teknis terkait mekanisme penyaluran BOP harus ditingkatkan.
2. Juknis BOP harus diterbitkan lebih awal.
3. Pencairan dana BOP setahun sekali saja.
4. Insentif untuk operator dimasukkan ke dalam Juknis BOP.
5. Anggaran BOP lebih ditingkatkan.
6. Efisiensi, transparansi, dan pengontrolan penggunaan BOP.
7. E-proposal untuk BOP.
8. Kepengurusan BOP di Pusat.
9. Semua peserta didik mendapatkan BOP.
10. Dilancarkan dan dipermudah dalam penggunaan BOP.
11. Mohon diperhatikan untuk LKP yang jarang/tidak pernah menerima BOP.
12. Penerima BOP jangan dibatasi di usia 21 tahun

DAFTAR PUSTAKA

_____. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

_____. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

_____. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wahana Komputer. 2017. Ragam Model Penelitian & Pengolahannya dengan SPSS. Semarang : Penerbit Andi.

Indraloka, Dwi Smaradahana dan Budi Santosa. 2017. Penerapan Text Mining untuk Melakukan Clustering Data Tweet Shopee Indonesia. Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 6, No.2.

PDSP-K. 2017. apkapm.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 3 Desember 2019.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ISBN 978-602-8449-28-1

